



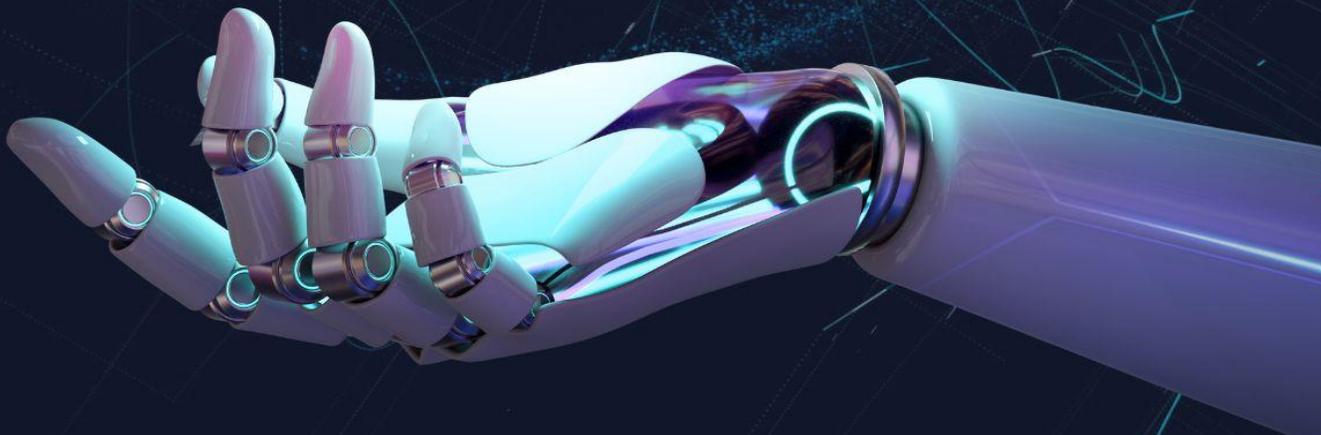
**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

# **INTEGRASI DATA DAN REBRANDING**

**BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*"Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi  
dalam menunjang Evidence Based Policy Making"*

**Jakarta, 22-23 Februari 2024**



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

---

**PROSIDING  
DISUSUN OLEH TIM SEMINAR  
DAN TIM INTEGRASI DATA BADAN KEAHLIAN**

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Seminar Nasional **“Integrasi Data dan Rebranding Badan Keahlian DPR RI Menuju Parlemen Modern: Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi Dalam Menunjang Evidence Based Policy Making”**. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Prosiding ini memuat seluruh hasil kegiatan seminar nasional dan diskusi. Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan Seminar Nasional ini yang telah diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan integrasi data dan *rebranding* Badan Keahlian DPR RI dalam menuju Parlemen yang modern.

Jakarta, Maret 2024  
Kepala Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
NIP. 196507101990031007

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

## **SAMBUTAN**

**SEKRETARIS JENDERAL DPR RI**

**Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si. M.I.Kom.**



***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

***Selamat Siang***

***Salam Sejahtera Bagi Kita Semua***

***Shalom***

***Om Swastyastu***

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

***Namo Buddhaya***

***Salam Kebajikan***

**Yth. Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum, (Kepala Badan Keahlian)**

**Yth. Ibu Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan  
Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia)**

**Yth. Ibu Sali Susiana, S.Sos, M.Si., (Plh. Kepala Pusat Analisis  
Keparlemenan)**

**Yth. Bapak Novianto M. Hantoro, S.H., M.H., (Plt. Kepala Pusat  
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)**

**Yth. Bapak Ricko Wahyudi, S.H., M.H. (Plh. Kepala Pusat Perancangan  
Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan  
Kesejahteraan Rakyat)**

**Yth. Bapak Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E., (Plh. Kepala Pusat  
Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara)**

**Yth. Bapak/Ibu REKTOR dari hampir seluruh Perguruan Tinggi di  
Indonesia;**

**Yth. Bapak/Ibu DEKAN dari hampir seluruh Perguruan Tinggi di  
Indonesia;**

**Yth. Bapak/Ibu Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat Jenderal  
DPR RI;**

**Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu Rapat Koordinasi dengan Mitra MoU Badan Keahlian dengan tema **Integrasi Data dan Rebranding Badan Keahlian DPR RI Menuju Parlemen Modern: Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam Menunjang Evidence Based Policy Making.**

Kami pada kesempatan ini juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para narasumber yakni kepada para narasumber yakni Bapak Prof. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ir Marwan, Dr. James Gomez, dan Ir. Windy Gambetta, MBA yang telah berkenan untuk berbagi pemikiran dan gagasannya terkait *Evidence Based Policy Making*, yang telah disampaikan pada sesi pagi tadi. Selanjutnya kepada narasumber pada sesi siang ini yakni Bapak Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E., M.S.E., Yan Setyawan, S.Kom, dan Teddy Prasetiawan, S.T., M.T. yang telah berkenan untuk berbagi pemikiran dan gagasannya terkait Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dengan Akademisi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. yang akan memandu jalannya kegiatan siang hari ini.

**Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,**

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat dalam era 5.0 berdampak secara luas terhadap pemanfaatan dan peluang pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam kehidupan

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

dan lingkungan kerja kita saat ini. Hal ini tentu juga kami rasakan dan sadari, kami Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian bersama-sama sedang membangun peningkatan kualitas pelayanan kepada klien kami yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berbasis elektronik. Kerja dan pelayanan tersebut dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabilitas.

Proses transformasi Sekjen DPR RI menuju parlemen modern didasarkan pada kebutuhan awal yang menjadi kunci pendukung terlaksananya parlemen modern yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun hal tersebut belum cukup karena dibutuhkan 2 sasaran program bagi terlaksananya Misi Sekjen DPR RI yaitu Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI dan yang kedua adalah pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi kemudahan akses informasi bagi publik.

**Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,**

DPR RI sedang berbenah diri untuk merespons perubahan lingkungan yang dinamis dan tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat saat ini telah menjadi sebuah *disruptive agent* yang menuntut proses dan kegiatan yang dilakukan secara tepat, cepat dan lebih efisien. Konsep Parlemen Modern yang telah digaungkan oleh para Anggota DPR RI telah diaplikasikan dalam penggunaan aplikasi *cloud* DPR RI, aplikasi *e-library* dan

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

berbagai aplikasi lainnya yang jumlahnya cukup banyak untuk mendukung kerja-kerja DPR RI.

Acara ini juga menandai babak baru bagi Badan Keahlian DPR RI dalam perannya mendukung kinerja DPR RI dan mewujudkan parlemen modern. **Pertama, Integrasi Data.** Badan Keahlian DPR RI berkomitmen untuk menyediakan data dan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses bagi seluruh anggota DPR RI, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan perguruan tinggi. Integrasi data ini akan memperkuat basis pengetahuan dan analisis kebijakan, sehingga anggota DPR RI dan AKD dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif, dan perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam membantu penyusunan kebijakan yang berbasis data. **Kedua, Rebranding.** Bersamaan dengan integrasi data, Badan Keahlian DPR RI juga melakukan *rebranding* untuk memperkuat identitas dan citranya sebagai lembaga yang profesional, terpercaya, dan terbuka untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi.

**Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,**

Integrasi Data yang dilakukan oleh Badan Keahlian dengan Perguruan Tinggi merupakan hal yang sangat penting dilakukan, hal ini dikarenakan dengan adanya dukungan data dari Perguruan Tinggi, maka dapat dipastikan bahwa DPR RI dapat menjadi Lembaga yang lebih kredibel dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Data menjadi alat bagi DPR RI dalam melakukan fungsinya sehingga dapat menjadi sistem *check and balances* yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

Integrasi Data dengan Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi kebutuhan DPR RI tersebut.

**Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,**

Semoga dengan dilaksanakannya Seminar Nasional kali ini dapat menjembatani kebutuhan Badan Keahlian dengan Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan DPR RI. Dengan Seminar Nasional ini juga diharapkan dapat menjadi implementasi atas kerja sama dan sinergitas antara Badan Keahlian dengan Perguruan Tinggi.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh***

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

---

# **SESI I**

# **SEMINAR NASIONAL**

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK  
DI INDONESIA**

*Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M. Hum.*

**GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UKSW**



Peran Perguruan Tinggi dimaknai sebagai peran Universitas atau Perguruan Tinggi di masyarakat, secara khusus berkaitan dengan kehadiran Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam Konstitusi terang benderang dinyatakan pada Pembukaan Alinea Keempat bahwa tujuan bernegara diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna mencerdaskan kehidupan bangsa

Jakarta  
29 Februari 2024

***PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI***

***INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN***

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

tidak bersifat sempit. Artinya, Pendidik hanya mencerdaskan Anak Didik di lingkungan kampus, atau kehadiran Perguruan Tinggi hanya dalam skala sempit, yaitu hanya mendidik Anak Didik, sehingga mencerdaskan disempitkan menjadi mendidik dan Bangsa disempitkan menjadi Anak Didik.

Menurut Narasumber, makna mencerdaskan kehidupan bangsa dipahami dalam arti yang cukup luas atau lebih luas, dimana Perguruan Tinggi hadir untuk hidup bermasyarakat atau hadir untuk hidup berbangsa. Tidak hanya untuk lingkup sempit di Universitas tetapi juga bagi bangsa negara dan masyarakat.

Dengan pemahaman seperti itu, jika melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), ada semacam pesan yang tersambung. Pada bagian konsideran menimbang UU Pendidikan Tinggi jelas ditentukan tujuan dibentuknya Perguruan Tinggi yaitu, “... pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa...” Kata-kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” lagi-lagi digunakan. Selain pada konsideran menimbang, kata-kata tersebut juga muncul dengan frase “...bermanfaat bagi kehidupan bangsa bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia...” pada bagian tujuan dalam UU Pendidikan Tinggi, yang berbicara mengenai aspek penelitian dan aspek pengabdian.

Berdasarkan hal tersebut, maka peran atau kontribusi dari Pendidikan Tinggi tidak pada posisi menunggu, tetapi harus pro aktif bagi Bangsa Indonesia. Ini hakikatnya adalah tanggung jawab moral sebuah Pendidikan Tinggi untuk berbakti bagi nusa dan bangsa. Apakah harus dibuat kewajiban

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

agar Perguruan Tinggi berkontribusi dalam pengambilan kebijakan publik atau kebijakan umum? Menurut Narasumber, minta atau tidak diminta, Perguruan Tinggi harus hadir untuk memberikan sesuatu untuk kepentingan bangsa atau bagi kepentingan negara.

Terkait jenis kebijakan publik, ada yang sifatnya substantif dan prosedural, distributif dan redistributif, kebijakan yang sifatnya mengatur, dan ada kebijakan terkait *public and private goods policies*.

Bila dilakukan penggolongan atau klasifikasi terhadap kebijakan publik di Indonesia setelah menjadi sesuatu yang sudah disepakati, dapat digolongkan dalam beberapa hal:

1. Dari segi aspek atau materi: bisa saja dibidang ekonomi, politik, perdagangan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Semua aspek bisa dimasuki oleh Pendidikan Tinggi untuk memberikan kontribusi.
2. Berdasarkan segi atau wujud *public policy* di Indonesia: wujudnya dalam bentuk *plan* atau rencana, dimana *output* akan berbentuk peraturan, apakah legislasi atau regulasi, ataupun peraturan-peraturan lain yang sifatnya peraturan kebijakan.

Lingkupnya bisa dilihat dari levelnya, apakah dari pemerintah pusat atautakah Lembaga Negara, Kemeterian atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian atautakah Komisi Negara. Termasuk juga pada level Pemerintahan Daerah.

Bila berbicara mengenai peran Perguruan Tinggi dalam pembentukan kebijakan publik, maka suka atau tidak suka, yang menjadi pemeran utamanya adalah siapa pengambil kebijakan. Pembentukan kebijakan publik sangat bergantung pada pemerannya atau Pemerintah. Berdasarkan paparan

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Narasumber, ada pergerakan lingkungan politik yang dapat dikatakan bergerak ke arah yang positif, yaitu DPR memberikan penghargaan terhadap peran Perguruan Tinggi. Jalurnya mungkin salah satunya melalui Badan Keahlian. Sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan politik sangat berpengaruh terhadap seberapa besar tingkat penerimaan negara atas peran Perguruan Tinggi. Kalau lingkungan politiknya atau konfigurasinya demokratis, pelibatan peran serta dari institusi apakah institusi Perguruan Tinggi ataukah yang lainnya, tidak akan ada hambatan yang berarti. Tetapi sebaliknya, bisa jadi dalam sebuah sistem yang mungkin dikatakan otoriter, maka peran atau kran itu akan sulit untuk dibuka. Itu yang dikatakan, semua itu tergantung pada sistem politik.

Pada tahap apa peran itu dimainkan? Bisa saat pembentukan, saat implementasi, saat monitoring dan saat evaluasi. Siapa yang melakukan peran? Secara sederhana dapat dikatakan bisa secara perorangan, bisa secara kelompok, bahkan secara institusi atau kelembagaan yang mengatasnamakan Perguruan Tinggi. Peran itu dilakukan melalui saluran atau media, dapat berupa opini, hasil kajian, bisa naskah akademik, *policy brief*, kertas kerja, dan seterusnya.

Bagi Narasumber, peran Perguruan Tinggi adalah kewajiban peran imperatif. Bukan sesuatu yang harus diminta agar Perguruan Tinggi itu terlibat, tetapi kewajiban imperatif dalam rangka ikut melaksanakan salah satu tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Faktor-faktor yang bisa mendorong dan menjadi kendala peran Perguruan Tinggi. Pertama peran itu akan semakin baik kalau ada political will dari

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

pengambil kebijakan. Bapak Kepala Badan DPR RI telah membuka ruang seluas-luasnya kepada terutama Perguruan Tinggi untuk memberikan masukan ataupun kritik ataupun rumusan terkait dengan apa yang akan dijadikan kebijakan publik di lingkungan DPR.

Kedua, terkait *rebranding* dan lain sebagainya. Tadi sudah dibicarakan mengenai bagaimana lembaga yang akan memerankan diri sebagai pengambil kebijakan, membuka seluas-luasnya terkait rencana, informasi rencana kebijakan yang akan ditempuh. Kalau mengenai hal itu tidak terbuka kepada Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi agak sulit juga untuk mengetahui pada ruang-ruang mana Perguruan Tinggi harus berperan atau ikut berkontribusi.

Berikutnya, peran itu akan bisa terjadi kalau Perguruan Tinggi proaktif atau peduli. Jangan Perguruan Tinggi hanya sibuk mengurus dirinya sendiri, pendidikan, pengajaran dalam lingkup yang sempit atau hanya menampilkan diri sebagai menara gading, tidak mau lagi peduli terhadap persoalan-persoalan kebangsaan atau kemasyarakatan, mungkin juga terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya administratif, sehingga bisa jadi peran itu juga akan terganggu.

Peran Perguruan Tinggi tersebut perlu ditunjang dengan koordinasi dan kolaborasi, yang dalam hal ini diistilahkan dengan integrasi. Mungkin dalam bahasa Narasumber penyebutannya agak cukup berbeda, yaitu kolaborasi riset hasil-hasil penelitian baik antar Lembaga Negara, Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian. Selain itu juga kesiapan sumber daya, termasuk di dalamnya mengenai kepedulian dan kebijakan Perguruan Tinggi.

Jakarta  
29 Februari 2024

***PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI***

***INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN***

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Faktor yang bisa menjadi penghambat. Bagaimana cara pandang para pengambil kebijakan terhadap Perguruan Tinggi, salah satu contohnya di DPR yang menurut pemahaman Narasumber terkadang konsensus politik bisa menggerus hasil-hasil kajian akademik. Hasil kajian akademik sudah disampaikan, Badan Keahlian juga sudah menyampaikan, tetapi harus dipahami bahwa segala kesepakatan itu adalah kesepakatan politik. Kadang kala hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik akan menjadi lain ketika diputuskan menjadi peraturan apakah legislasi ataukah regulasi (misalkan dalam konteks pembentukan kebijakan).

Selain itu, bisa karena ada varian atau variasi input dari berbagai pihak yang bisa menimbulkan kebingungan dalam menentukan kebijakan, apakah kekuatan seperti input dari Anggota atau Partai Politik atau Alat Kelengkapan, dibandingkan dengan Perguruan Tinggi. Hal ini terkait pertarungan antara sumber informasi atau sumber data.

Bisa juga karena persoalan egoisme sektoral dalam pelaksanaan riset atau skeptisisme terhadap peran Perguruan Tinggi. Berbicara sebagai pribadi atau sekelompok orang berbicara sebagai kapasitas Perguruan Tinggi, lantas tidak melihat apa lagunya, tetapi melihat siapa yang menyanyikan. Tidak lagi melihat tujuannya apakah itu baik, tetapi melihat siapa yang mengatakan, sehingga kadang-kadang skeptisisme akan cukup mempengaruhi bagaimana tingkat penerimaan atau peran atau kontribusi dari Perguruan Tinggi.

Yang terakhir, bisa jadi peran itu akan mengalami hambatan manakala minim keterbukaan dari rencana keterbukaan publik dan soal kebijakan

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

pimpinan Perguruan Tinggi yang “kurang peduli terhadap persoalan-persoalan kebangsaan”.

Demikian paparan Narasumber, dan sangat berterimakasih bila dikritik, diberikan tambahan, atau diperbaiki untuk kepentingan semua dalam melihat bagaimana peran Perguruan Tinggi dalam membentuk atau pembentukan kebijakan publik (*public policy*).

## **MATERI**

The slide features a dark background with a lightbulb and a graduation cap. The logo of Universitas Kristen Sepuluh Nopember (UKSW) Faculty of Law is in the top left. The main title is in large white letters. The author's name and affiliation are in red and white. The seminar topic and date are in yellow at the bottom.

**FAKULTAS HUKUM UKSW**

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM  
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK  
DI INDONESIA**

**Umu Rauta**  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum UKSW

Materi Seminar Nasional tentang  
Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dengan Akademisi Dalam  
Meningkatkan Kualitas Pembentukan Kebijakan Publik

Jakarta, 22-24 Februari 2024

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**01** Makna Kehadiran Perguruan Tinggi

**02** Hakikat Kehadiran Perguruan Tinggi di Indonesia

**03** Hakikat, Jenis, Tahapan Kebijakan Publik

**04** Peran Perguruan Tinggi Dalam Pembentukan Kebijakan Publik

**Outline Materi**

A slide titled "Outline Materi" with a dark grey background. On the right side, there is a graphic of a white cloud with a red ladder leaning against it, supported by two red pencils. On the left side, there are four numbered items in colored circles: 01 (blue), 02 (orange), 03 (grey), and 04 (yellow).

**01** **MAKNA KEHADIRAN PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS**

**TEACHING**

- Sumber pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia
- Pembelajaran berbasis kasus dan project
- Integrasi pengajaran dengan penelitian dan PKM

**RESEARCH & DISEMINASI**

- Penelitian dengan solusi berbasis bukti
- Inovasi
- Dialog cross-sectoral
- Partnership (Collaboration) dengan pemerintah dan komunitas di masyarakat

**PUBLIC POLICIES**

A diagram titled "01 MAKNA KEHADIRAN PERGURUAN TINGGI" showing a wavy black road with dashed white lines. The road starts at a yellow location pin labeled "UNIVERSITAS", goes down to a red location pin labeled "TEACHING", then up to a green location pin labeled "RESEARCH & DISEMINASI", and finally up to a purple location pin labeled "PUBLIC POLICIES". Below the road, there are two columns of bullet points corresponding to the "TEACHING" and "RESEARCH & DISEMINASI" stages. The background is a light grey world map.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

**02 Hakikat Kehadiran Perguruan Tinggi di Indonesia**



**Filosofis - UUD**

Tugas Negara: mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran Perguruan Tinggi untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.



**Normatif – UU PT**

Dihasilkannya Penelitian yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;



**Normatif – UU PT**

Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.



Terwujudnya Pengabdian Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

**03 Hakikat Kebijakan Publik**

Thomas R.Dye :  
*Public Policy is whatever the Government choose “to do or not to do”.*

James E. Anderson:  
*Public Policy are those policies developed by Governmental Bodies and Officials.*

George C. Edwards:  
*Public Policy is what government say and do, or do not do it is the goals or purposes of government programs.*

Islamy;  
Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

### 03 Jenis Kebijakan Publik



### 03 Tahapan Kebijakan Publik



**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jakarta  
29 Februari 2024

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

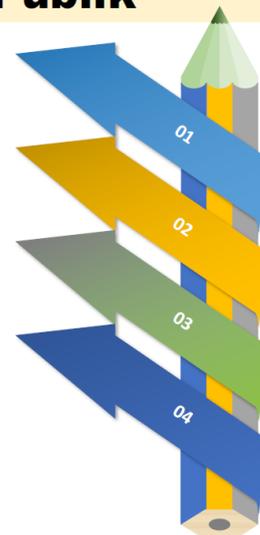
*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**03 Penggolongan Kebijakan Publik Indonesia**



**04 Peran Perguruan Tinggi Dalam Pembentukan Kebijakan Publik**

-  Peran bergantung pada: Sistem Politik (Demokratis / Otoriter).
-  Peran pada setiap tahapan Pembentukan Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi.
-  Peran secara kelembagaan atau kelompok / personal.  
Peran secara sukarela (tanggung jawab moral) & pelibatan dari Pengambil Kebijakan.
-  Peran harus berbasis hasil kajian agar terjamin validitas.  
Saluran (Media): Opini, Hasil Penelitian, Naskah Akademik, Model, Policy Brief, Kertas Kerja.



**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

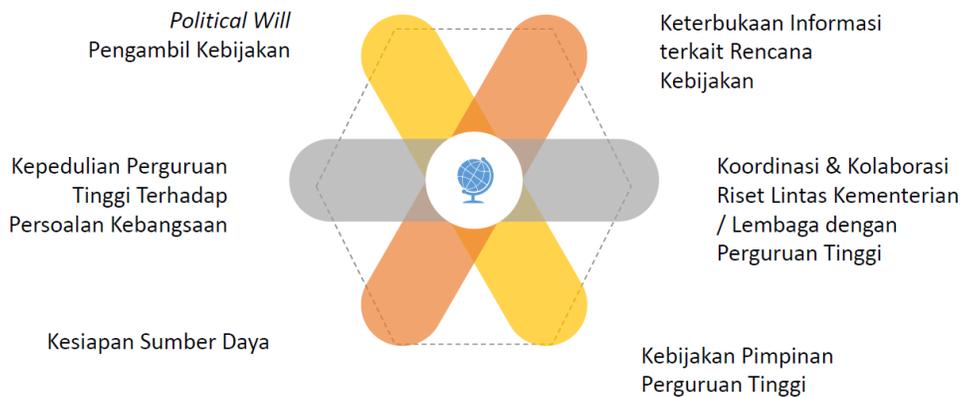
Jakarta  
29 Februari 2024

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



**Ekosistem Peran Perguruan Tinggi - Pendorong**



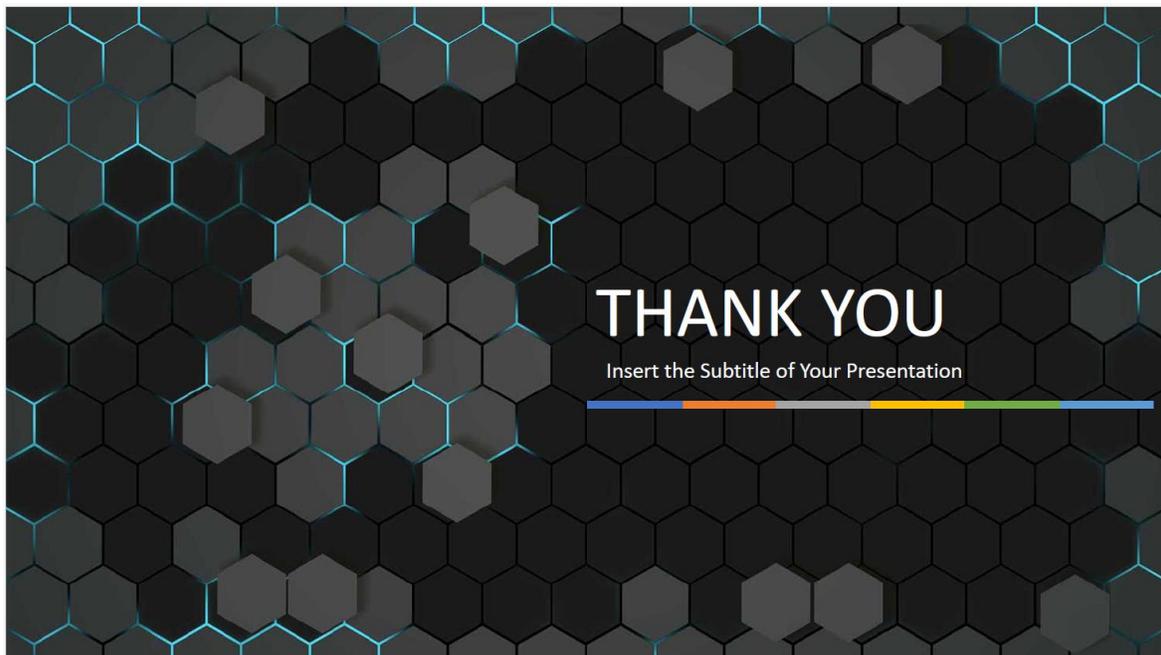
Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

## Ekosistem Peran Perguruan Tinggi - Penghambat



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**EVIDENCE-BASED POLICY-MAKING & INFLUENCING**

**Dr. James Gomez**

**REGIONAL DIRECTOR ASIA CENTRE**



Asia Centre merupakan lembaga penelitian masyarakat yang khusus menangani konsultasi dengan ECOSOC PBB. Asia Centre memiliki beberapa kantor penghubung yang tersebar di beberapa negara di Asia, antara lain: Bangkok (Pusat Penelitian dan Pusat Pertemuan), Phnom Penh (Pusat Pelatihan), dan Johor Bahru (Pusat Media). Adapun aktivitas utama Asia Centre yaitu penelitian, pelatihan, advokasi, dan media.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

*Policy* atau kebijakan adalah pedoman/aturan yang diciptakan oleh organisasi atau pemerintah sebagai pedoman dalam membuat keputusan dan tindakan. Isinya menguraikan tujuan, strategi, dan hasil yang diinginkan untuk isu-isu tertentu. Misal terkait:

- Ujaran kebencian. Sejauhmana ujaran kebencian harus diatur atau dikurangi dengan tetap menjamin kebebasan berpendapat?
- Integritas Pemilu. Bagaimana kita dapat memastikan disinformasi tidak berdampak buruk terhadap integritas pemilu?

Siklus Penentuan Kebijakan: “Penelitian” cocok untuk setiap langkah siklus kebijakan.

- Agenda Setting (mengidentifikasi masalah)
- Formulasi Kebijakan (mengevaluasi cara mengatasi masalah, menetapkan tujuan, menentukan biaya, dan memilih instrumen kebijakan).
- Pembuatan Keputusan/Adopsi (dari berbagai pilihan kebijakan, memutuskan salah satu tindakan atau tidak melakukan tindakan)
- Implementasi/Pelaksanaan Kebijakan (menempatkan keputusan dalam bentuk tindakan)
- Evaluasi (menilai hasil/implementasi, dampak dan keberhasilan kebijakan)
- Keberlanjutan Kebijakan (keputusan terkait apakah akan melanjutkan, mengubah, atau mengakhiri kebijakan)

Pembuatan dan Pengaruh Kebijakan Berbasis Bukti: Proses Penelitian, antara lain:

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

- Identifikasi Tujuan (terkait apa tahapan dari proses kebijakan dan apa penelitian yang dibutuhkan)
- Identifikasi Metodologi (metodologi apa yang digunakan, kualitatif atau kuantitatif atau campuran kualitatif dan kuantitatif)
- Pengumpulan Data (pertimbangan terhadap data yang bersifat privasi dan pengumpulan data yang inklusif)
- Analisis data, pengumpulan data, dan interpretasi
- Formulasi rekomendasi berdasarkan bukti secara jelas dan tepat sasaran.
- Advokasi Kebijakan (pemerintah, parlemen, komunitas internasional dan masyarakat)

Pembuatan dan Pengaruh Kebijakan Berbasis Bukti: Rekomendasi Kebijakan

- Selaras dengan tujuan umum
- Menargetkan semua pemangku kepentingan yang relevan
- Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan rekomendasi.
- Gunakan kesempatan untuk berkonsultasi dengan para ahli untuk mengumpulkan dan merenungkan rekomendasi.

Pembuatan dan Pengaruh Kebijakan Berbasis Bukti: Sasaran Advokasi Berbasis Bukti

- Pemerintah, meliputi: kepemimpinan politik, birokrat, staf
- Parlemen/DPR RI, meliputi: politisi, partai politik, PNS di parlemen
- Komunitas Internasional: meliputi: ahli/pakar, misi diplomasi

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

- Masyarakat sipil, meliputi: Lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, media independent

Terdapat beberapa hambatan dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti, antaranya yaitu adanya politisasi dan sentimen publik, korupsi, dan ketidakkompetenan/ketidakkemampuan dan pengalokasian sumber daya.

## **MATERI**



Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Civil Society Research Institute  
in Special Consultative Status  
with UN ECOSOC



**CORE ACTIVITIES**



**Research**



**Training**



**Advocacy**



**Media**

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

## Policy: A Definition

**Guidelines or rules** created by an organisation or government to **guide decision-making** and actions. It outlines goals, strategies, and desired outcomes for specific issues.



### Hate Speech

*To what extent should hate speech be regulated or mitigated while ensuring freedom of speech?*

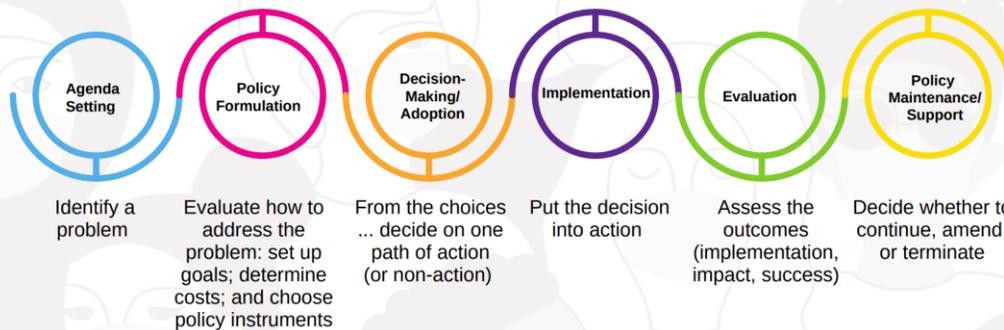


### Electoral Integrity

*How can we ensure disinformation does not have an adverse impact on election integrity?*



## The Policy Cycle

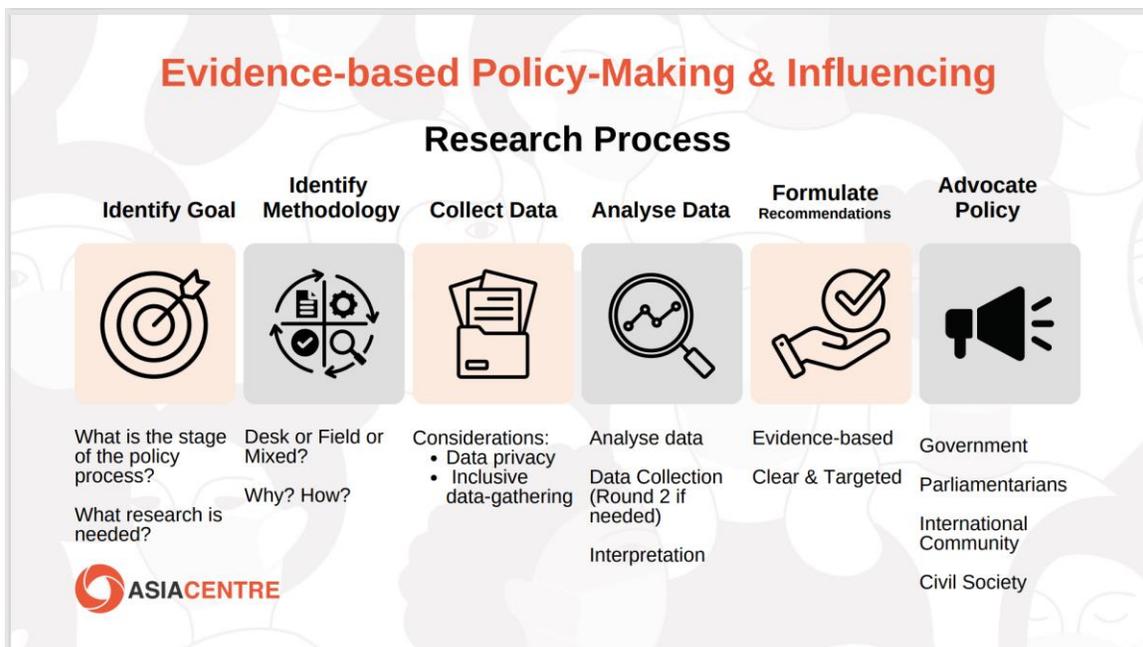
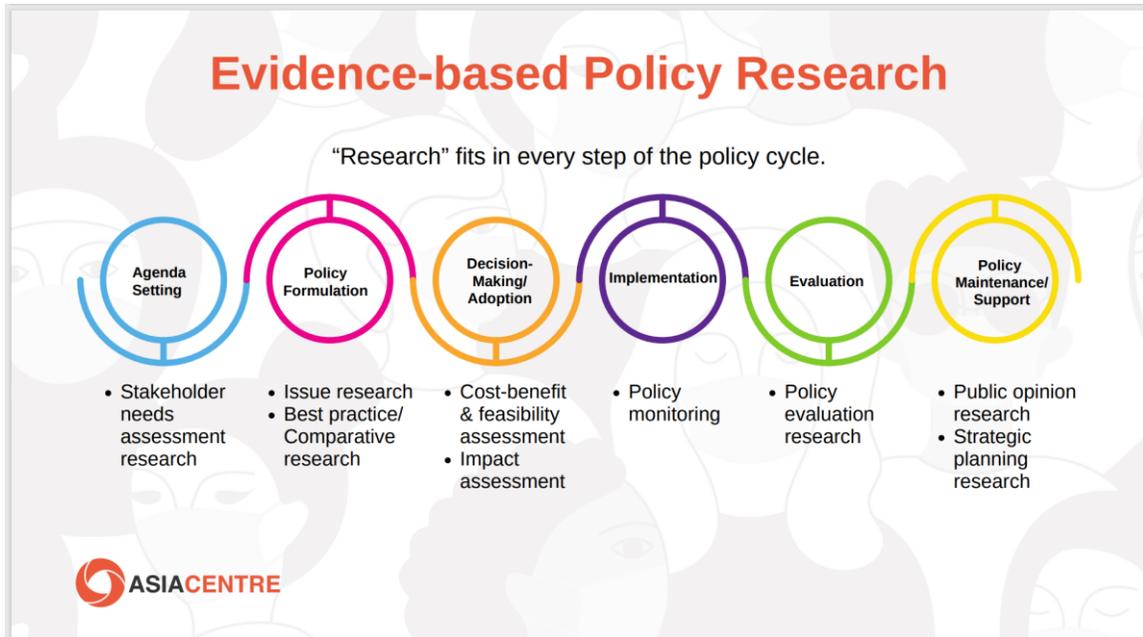


**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jakarta  
29 Februari 2024

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**Evidence-based Policy-Making & Influencing  
Policy Recommendations**



- Align with the overarching objectives
- Target all relevant stakeholders
- Set clear and measurable objectives to assess the success of the recommendations.
- Use opportunities to consult with experts to gather and reflect on recommendations.



**Evidence-based Policy-Making & Influencing  
Targets of Evidence-based Advocacy**

**Government**



- Political Leadership
- Bureaucratic Agencies
- Staff

**Parliament**



- Politicians
- Political parties
- Parliamentary civil service

**International Community**



- UN Mechanisms/ Expert
- Diplomatic Missions

**Civil Society**



- INGOs
- CSOs
- Independent media



Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

### Impediments to Evidence-based Policy-Making

Politicisation & Public Sentiment      Corruption      Incompetence & Resource Allocation

ASIA CENTRE

ASIA CENTRE

# THANK YOU!

- Asia Centre
- Asia Centre
- Asia Centre
- @asiacentre\_org
- asiacentre\_org
- asiacentre

email: [contact@asiacentre.org](mailto:contact@asiacentre.org)

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

**EVIDENCE-BASED POLICY-MAKING**

**Prof. Dr. Ir. Marwan**

**REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



*Evidence Based Policy Making* akan terus berkembang di mana akan ada *roadmap* yang dilaksanakan. Saat ini perlu melihat apa yang sudah berjalan dan apa yang mungkin bisa dilakukan agar kebijakan Badan Keahlian bisa lebih tepat akurat dan baik. Berdasarkan *website* terdapat *list* Prolegnas memiliki jumlah yang sangat banyak sehingga menjadi suatu tantangan. Ditambah lagi dengan kegiatan rutin pengawasan atas regulasi yang telah menjadi produk hukum. Badan Keahlian memiliki peran seperti Perguruan Tinggi di mana produk yang dihasilkan menggunakan pendekatan ilmiah.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Perlu dipahami bahwa produk Badan Keahlian, yang merupakan hasil dari penelitian ilmiah, seringkali menghadapi *trade-off* dengan keputusan politik. Saat produk tersebut diintegrasikan ke dalam proses legislasi, aspek konteks historis, sosio-politik, dan sosio-ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi, menciptakan suatu *trade-off* antara nilai ilmiah produk dari Badan Keahlian dengan tuntutan konteks sosial yang perlu diselesaikan. Keselarasan antara kedua aspek ini menjadi sebuah keputusan politik. Dalam hal ini, peran perguruan tinggi diharapkan tetap kuat tanpa tergerus terlalu banyak. Perlu ada *outcome* terukur yang disampaikan kepada masyarakat.

Integrasi data merupakan kebijakan yang sangat bagus sehingga mendapatkan produk legislasi yang tepat, akurat, dan efektif dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa kedepan, tantangan utama yang perlu menjadi perhatian Badan Keahlian ialah:

1. kompleksitas permasalahan, di mana permasalahan ke depan semakin kompleks.
2. *uncertainty* (ketidakpastian);
3. Produk legislasi yang dihasilkan harus dapat berlaku dalam jangka panjang. Pemanfaatan data tidak hanya dilihat dari kecenderungan data saat ini, namun diharapkan Badan Keahlian dapat memprediksi masa depan, sehingga perlu ada langkah-langkah mitigasi.
4. Bias – kepentingan, persepsi. Perlu meminimalkan bias baik karena kepentingan maupun persepsi.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Solusi dari tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan *AI-based policy making* yang dapat membantu percepatan kebijakan demi mewujudkan parlemen modern. Pengalaman di Korea Selatan dapat menjadi bahan rujukan Indonesia. Berdasarkan hasil KDI “*A Survey in the Perception and Actual Condition of Adopting AI to Government’s Business Support Policy*” pada 2020 di Korea menghasilkan bahwa tantangan terbesar yang sedang dihadapi adalah integrasi data. Data yang diintegrasikan tidak hanya data-data nasional, namun juga data global yang dapat dimanfaatkan. Tantangan lain ialah kesiapan SDM dan bisnis proses untuk mengantisipasi perkembangan *Artificial Intelligent*.

Beberapa persoalan yang sering dihadapi:

1. Sinkronisasi antarkebijakan

Tentunya dalam sebuah kebijakan sering terjadinya Interaksi. Peran Badan Keahlian sangat penting menjadi *thin thank* dimana semua bidang dapat berinteraksi.

2. Keterlibatan multi-stakeholders

Bagaimana melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk perguruan tinggi. Sehingga produk legislasi dapat diterima dan efektif berlaku di semua tempat

3. Kebijakan: afirmatif, pemerataan, “imparsial”, future uncertainty.

Langkah afirmatif perlu diperhatikan karna kondisi disparitas sosial dan ekonomi Indonesia serta terkait dengan pemerataan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah mitigasi yang perlu diantisipasi dalam produk legislasi.

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**MATERI**



**EVIDENCE BASED POLICY MAKING**

**Prof Dr. Ir. Marwan**  
Rektor Universitas Syiah Kuala

**Seminar Nasional**  
“INTEGRASI DATA BADAN KEAHLIAN DPR RI DENGAN AKADEMISI  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK”  
Jakarta, 23 Februari 2024

Peran BK-  
DPR, dalam  
kajian:

- Kebijakan quick-response: membahani anggota DPR dalam Rapat Dengar Pendapat terhadap permasalahan urgensi
- Kebijakan jangka panjang – naskah akademik penyusunan legislasi
- Membutuhkan pemahaman berdasarkan data/fakta yang akurat
- Membutuhkan analisis yang tepat agar lahir kebijakan yang efektif menyelesaikan permasalahan

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**Apa itu Evidence Based Policy Making ?**



- ✓ “Pembuatan kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti ilmiah dan data yang terpadu untuk menginformasikan pengambilan keputusan.”

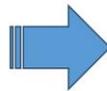
**Tujuan Evidence Based Policy Making :**

- ✓ “Meningkatkan ketepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam penetapan formulasi STRATEGI dan KEBIJAKAN serta intervensi PROGRAM PEMBANGUNAN berdasarkan bukti-bukti yang telah berhasil.”



Kesamaan

- Evidence based Policy Making
- Evidence based Planning
- Policy Studies/Research



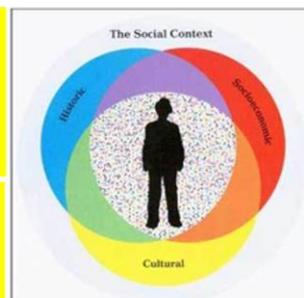
**Scientific Approach:**

- ✓ **Reviews ← DATA**
- ✓ Problem/Issue Identification
- ✓ Hypothesis
- ✓ **Research Method → DATA**
- ✓ Results and Analysis
- ✓ Conclusion and Recommendation

**Role of BK-DPR**

- as scientific policy advisor
- sound, unbiased, legitimate, impartial and publicly accessible

However, policy-makers must balance the scientific evidence in the overall societal context and must make trade-offs.



Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

**Kekuatan Evidence Based Policy Making**



- ✓ Dapat menganalisis permasalahan utama pembangunan berdasarkan bukti yang kuat dan data terpadu, bukan atas dasar opini/pendapat.

BUKTI/DATA – AKURAT, BERKUALITAS dan  
KOMPREHENSIF  
LINGKUP – LUAS dan KOMPLEKS



SISTEM DATA dan INFORMASI TERPADU

Dapatkah menghasilkan juga  
“Foresight for insights beyond the  
evidence”? – future uncertainty :  
pandemic, war, climate change,  
geopolitics etc.

- untuk antisipasi sesuatu yang tidak diharapkan
- langkah mitigasi
- stress testing method

**Kekuatan Evidence Based Policy Making**



- ✓ Dapat menganalisis permasalahan utama pembangunan berdasarkan Bukti yang kuat dan Data dan terintegrasi, bukan atas dasar opini/pendapat.

**PROSES Evidence Based Policy Making (Sebuah Alternatif)**

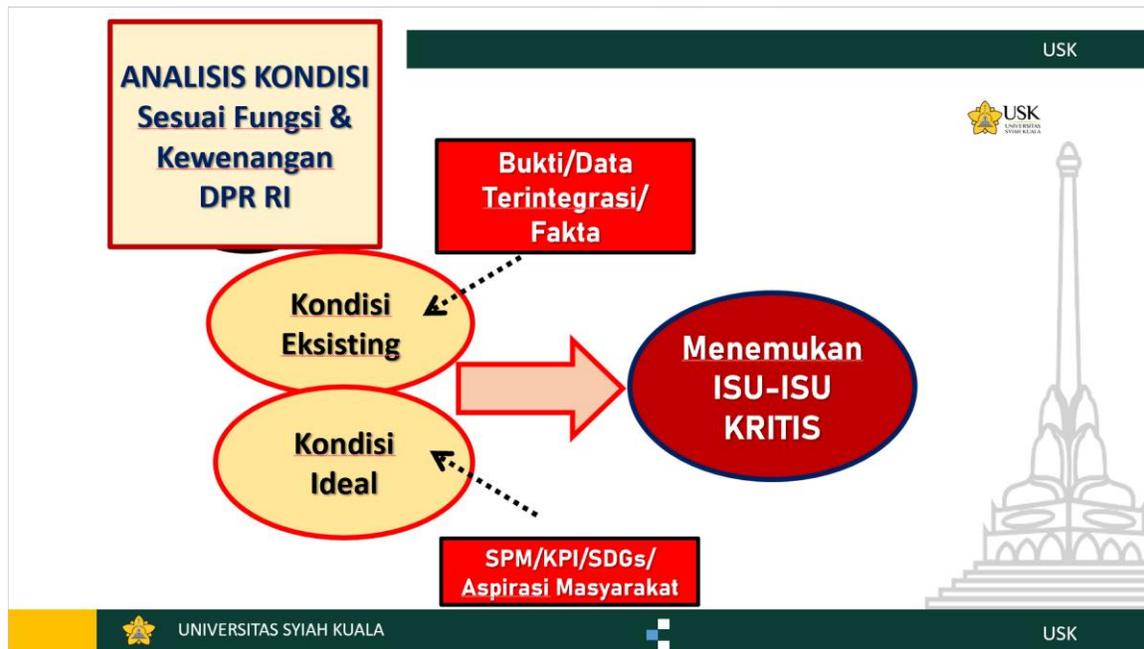
- 1). Melakukan analisis kondisi berbasis bukti yang kuat/data yang terintegrasi guna menemukan Isu-isu Kritis pembangunan yang relevan dengan Kondisi Aktual (existing condition) dan membandingkannya dengan Kondisi Ideal yang diidamkan(ideal condition).

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Tantangan:

- ✓ Kompleksitas permasalahan
- ✓ Uncertainty (ketidakpastian)
- ✓ Bias – kepentingan, persepsi

Solusi: Digital approach → AI-based Policy Making ?

- Big data – managing vast number of data
- Analytical Capabilities – review, data processing and foresight
- Machine Learning - facilitate more informed, quicker, and more rigorous decisions

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**



**But AI is not a perfect solution...**

**Three questions need to be asked before applying AI**

-   
**1. Is AI appropriate to use in this particular situation?**  
Human involvement should not be displaced in certain situations since AI cannot replicate nuanced human considerations like compassion or equity.
-   
**2. Who develops the AI?**  
The profile of AI developers matters because human factors such as biases, prejudices, or experience can influence AI algorithms and models and, ultimately, outcomes.
-   
**3. What data is provided to the AI?**  
Data serves as AI's lifeblood, but it is vulnerable to infrastructure limitations, structural and historical biases, and ethical concerns, among others.

Jakarta  
29 Februari 2024

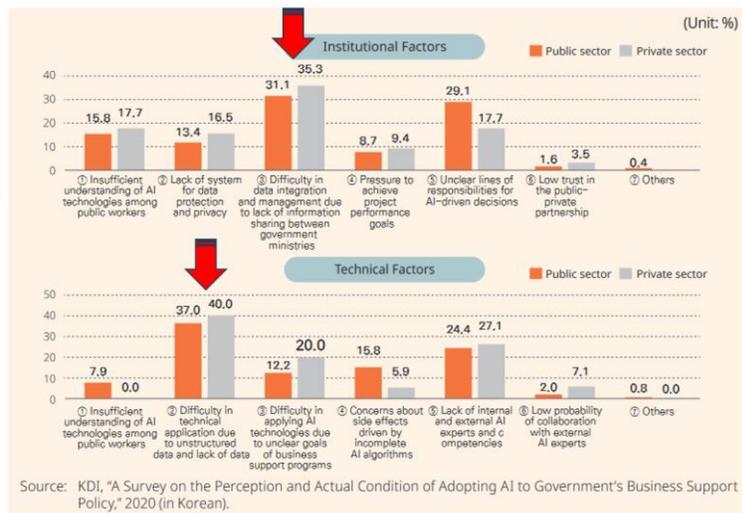
**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

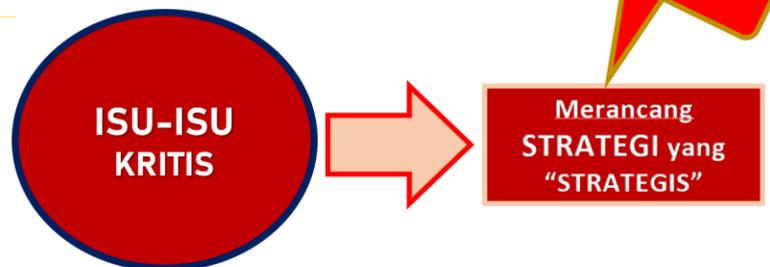
**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

Obstacles to the  
Transition into  
AI-driven  
Policymaking

**Data Integration is  
the largest obstacle**



2). Berdasarkan Isu-isu Kritis, kemudian dirancang Strategi pembangunan yang tepat untuk menyelesaikan/ menuntaskan Isu-isu Kritis tersebut.



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

## Apa itu STRATEGI ?



□ adalah solusi atau cara untuk mencapai tujuan, target, dan sasaran yang telah ditentukan.

□ McCarthy & Minichiello (dalam Babafemi, 2015) menyebut bahwa, strategi akan menyediakan arah tujuan utama untuk memandu aktivitas-aktivitas organisasi dan para staf di dalamnya.

• Thompson, Strickland, dan Gamble (dalam Tapera, 2014) menyatakan, formulasi strategi yang baik adalah mampu membangun kedudukan yang kuat dan berkapasitas didalam pasar serta menunjukkan keberhasilan kinerja institusi.

• Menurut Quaye et al. (2015), strategi yang hebat tak bernilai jika tidak dapat diimplementasi. Lebih baik menjalankan strategi yang biasa tapi berhasil, dibanding memilih strategi yang hebat tapi tak terimplementasi. Keberhasilan dalam menjalankan strategi dapat menyukseskan seluruh aktivitas lainnya.



3). Strategi yang telah dirancang harus diikuti dengan formulasi Kebijakan publik yang tepat agar strategi dapat berjalan dengan efektif.

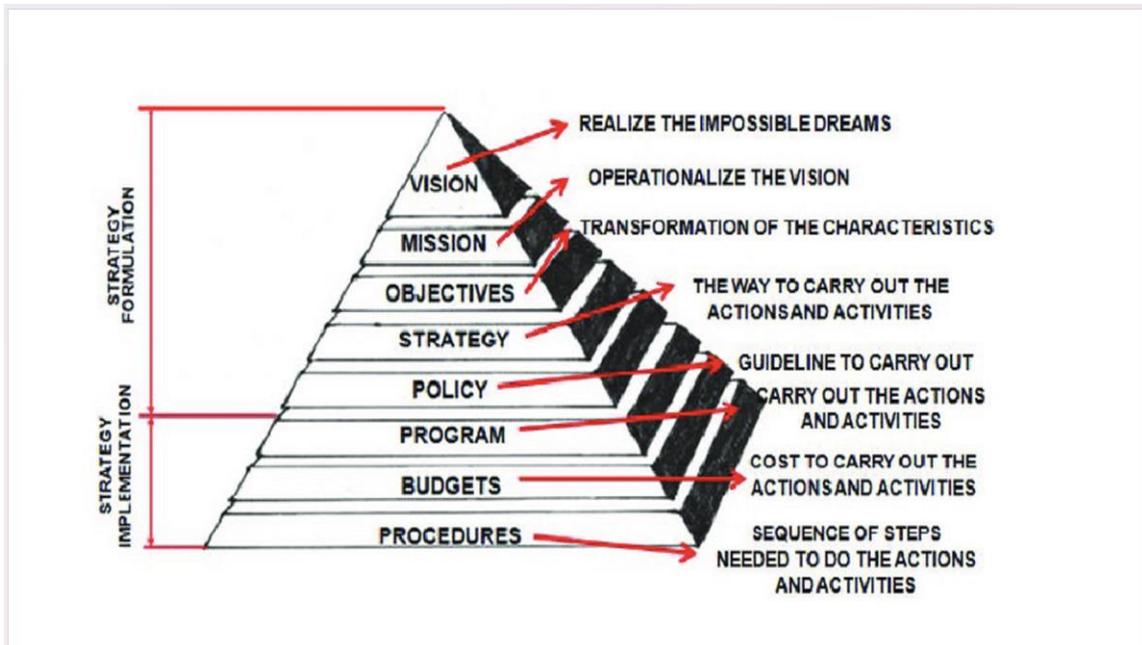


*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

Jakarta  
29 Februari 2024

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Beberapa persoalan:



SINKRONISASI ANTAR  
KEBIJAKAN



KETERLIBATAN MULTI-  
STAKEHOLDERS



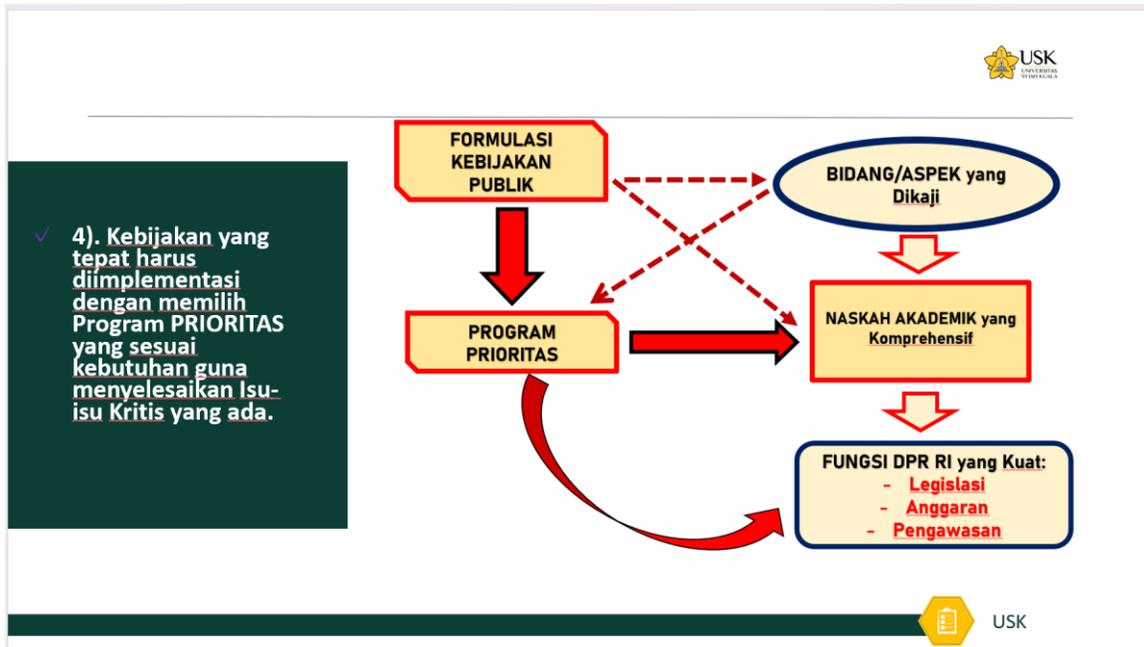
KEBIJAKAN: AFIRMATIF,  
PEMERATAAN, “IMPARSIAL”,  
FUTURE UNCERTAINTY

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



**PENUTUP**

- Bukti yang kuat dan Data yang terintegrasi menjadi dasar untuk menemukan Isu-isu Kritis;
- Isu-isu Kritis harus diselesaikan dengan mengimplementasi Strategi dan Kebijakan yang tepat;
- Strategi dan Kebijakan menjadi dasar dalam memilih dan menetapkan Program-Program yang Prioritas akan diimplementasikan; dan
- Naskah Akademik yang komprehensif dan berkualitas terlahir dari Bukti yang kuat dan Data yang Terintegrasi dengan alur dan proses seperti diuraikan di atas.

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Terima Kasih



UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

**DATA TERINTEGRASI UNTUK  
EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE DECISION MAKING**

***Windy Gambetta***

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



Parlemen modern merupakan parlemen yang memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk melaksanakan fungsinya. Bahwa proses kerja DPR melibatkan data baik internal maupun eksternal (masyarakat termasuk Perguruan Tinggi), seperti aspirasi dan informasi lainnya. Berbicara tentang

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

data, tidak hanya data tabular saja tetapi juga mencakup dokumen dan *review-review online* lainnya. Banyaknya ragam jenis data yang berbeda-beda membuat data yang didapatkan tidak bersifat konsisten. Data yang beragam ini juga berasal dari beragam sumber, dapat berasal dari internal BK DPR dan eksternal BK DPR (K/L dan sosial media). Hal yang menjadi masalah kemudian adalah apabila data tersebut tidak terintegrasi yang mengakibatkan banyaknya sudut pandang, inkonsistensi data, dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Adapun tantangan integrasi data, yaitu keberagaman data dan metodologi yang belum berstandar, duplikasi dan minimnya keterpaduan data, kekurangan SDM talenta digital dan efektivitas data, serta keengganan berbagi.

Oleh karenanya, Pak Windy Gambetta menyampaikan bahwa perlu pemanfaatan teknologi untuk data yang terintegritas yang dapat membantu kerja DPR yaitu dengan target banyak sumber, satu *view* bersama dengan Repositori DPR. Repositori ini masih berada pada tahap penyimpanan data yang berasal dari sumber yang beragam yang kemudian nantinya akan dimanfaatkan secara maksimal. Kehadiran repositori ini berguna untuk memudahkan dalam pencarian data yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan DPR yang dibagi pada beberapa tingkatan, yaitu:

1. Pencarian data dengan menggunakan kata kunci tertentu
2. Pencarian data menggunakan arti/ hubungan kata kunci
3. Pencarian data dengan interaksi dua arah (*chatbot*).

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Repositori ini akan dirancang dengan NLP & Speech Technology. Manfaat dari pengembangan repositori data ini, antara lain:

*1. Document management system*

Penyimpanan dan pengaksesan dokumen legislatif dan mendukung pemanfaatan dokumen non-kertas.

*2. Legislative tracking system*

Repositori ini akan menyajikan beberapa fitur seperti pelacakan status RUU (dan perubahannya), monitoring komisi, rekaman pengambilan keputusan, dan notification and alerts.

*3. Public access portals*

Repositori ini dapat diakses publik dengan memonitor kegiatan DPR melalui akses terhadap dokumen legislatif, siaran langsung (*live streaming*) sesi parlemen, juga memberikan fasilitas kepada masyarakat (termasuk PT) untuk memasukkan aspirasi.

Repositori ini ditujukan untuk mempromosikan transparansi dan partisipasi dalam demokrasi. DPR memerlukan data yang tepat untuk mendukung pembuatan kebijakan berdasar *evidence*/data yang perlu integrasi dengan melakukan pembangunan repositori data/informasi menjadi awal menuju evidence-based policy making dengan pemanfaatan teknologi AI.

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**MATERI**



*Data Terintegrasi untuk  
Evidence-based Legislative  
Decision Making*

Windy Gambetta  
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika  
Institut Teknologi Bandung

Jakarta, 23 Februari 2023

*Parlemen Modern*

Parlemen yang memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam menjalankan fungsinya

- *Integrasi Dijital*
- *Transparan dan Akuntabel*
- *Keikutsertaan Masyarakat (Public Engagement and Participation)*
- *Efisien dan Efektif*
- *Adaptif dan Inovatif*
- *Hubungan lokal dan global*



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

*Fungsi (Umum) Parlemen*

- Legislasi -> UU
- Anggaran -> APBN
- Pengawasan -> Pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- Lainnya -> Menampung aspirasi Masyarakat



*Memerlukan (dan menghasilkan) Data/ Informasi*



Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

Memerlukan (dan menghasilkan) Data/ Informasi

Beragam data



dari Beragam Sumber Data



disimpan di berbagai Penyimpanan

- Internal BK DPR



- Eksternal BK DPR
  - K/L
  - ...

Akibat Data tidak terintegrasi

- Banyak sudut pandang
- Inkonsistensi data
- Memperlambat proses pengambilan keputusan

Tantangan Integrasi Data

- Keberagaman data dan metodologi pendataan yang belum berstandar
- Duplikasi dan minimnya keterpaduan data
- Kekurangan SDM talenta digital dan efektivitas anggaran data
- Keengganan berbagi

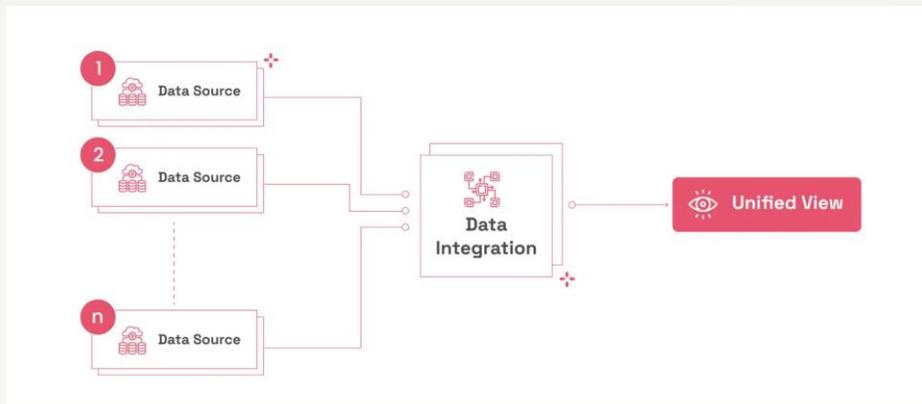
**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jakarta  
29 Februari 2024

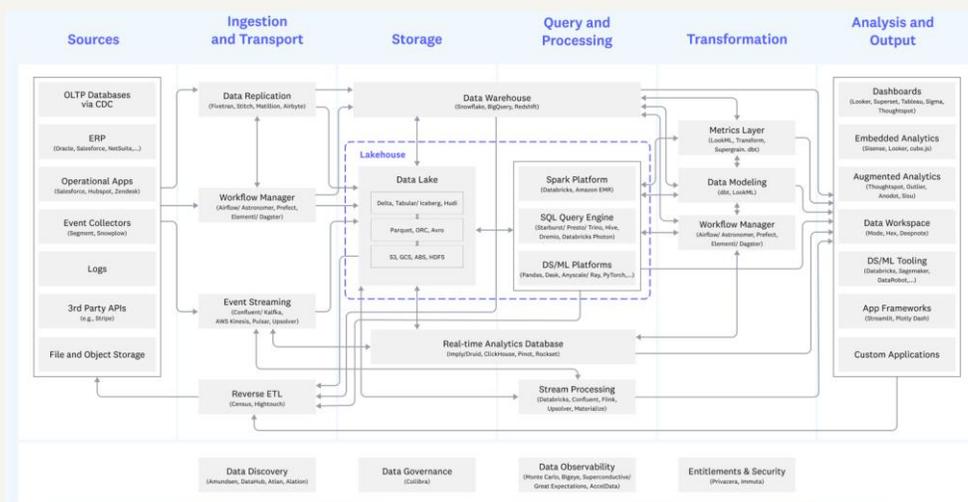
**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

*Target: Banyak Sumber, Satu View bersama*



*Target: Integrated Data Infrastructures*



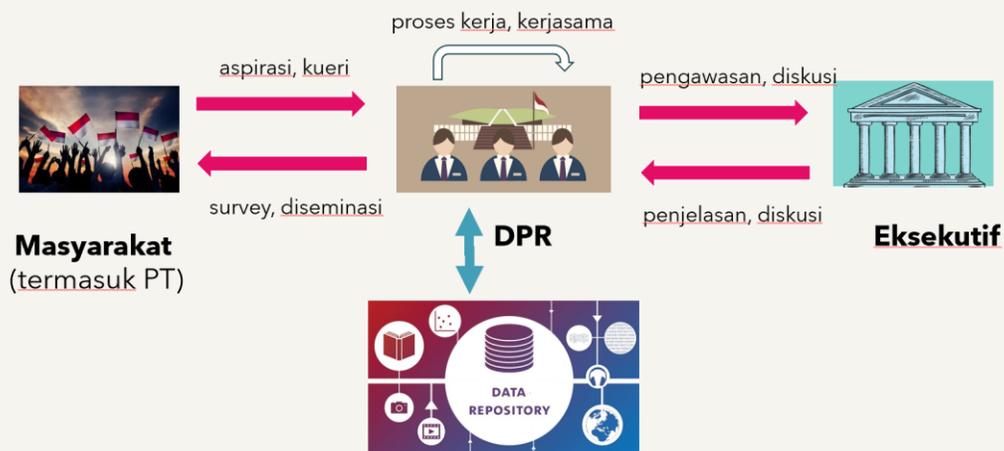
Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

*Target: Integrated Data Infrastructures*



*Level Pemanfaatan Repositori*



**Search Engine:**  
pencarian dengan kata kunci tertentu



**Semantic Search:**  
pencarian dengan arti/  
hubungan kata kunci



**Chatting:**  
pencarian dengan interaksi dua arah ('Diskusi')

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

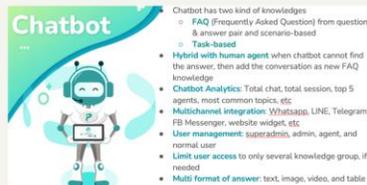
Jakarta  
29 Februari 2024

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

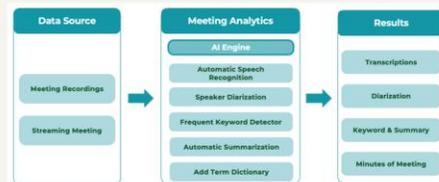
**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

## Teknologi yang Diperlukan

### • Chatbot



### NLP & Speech Technology



### • Large Language Model

Chatbot ala [ChatGPT](#)

[Pemanfaatan Open Source LLM dengan Dedicated Fine Tuning](#)

## Document Management Systems

- [Sistem manajemen dokumen online untuk penyimpanan dan pengaksesan dokumen legislatif](#)
- [Mendukung sustainability dengan mengurangi pemanfaatan dokumen non-kertas.](#)

### • Fitur

- [Centralized Repository](#)
- [Document Indexing](#)
- [Pengendalian Akses](#)
- [Pengendalian Versi](#)
- [Kakas kolaborasi](#)
- [Pengamanan Dokumen](#)
- [Keterkaitan Dokumen](#)
- [Speech/ Text Query](#)

### • Teknologi

- [Database Technologies](#)
- [Cloud Storage](#)
- [Content Management Frameworks](#)
- [Search Engine Technology](#)
- [Encryption and Security Tools](#)
- [User Interface \(UI\) Development Tools](#)
- [API Integration](#)
- [Artificial Intelligence](#)

Jakarta  
29 Februari 2024

## PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI

### INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI MENUJU PARLEMEN MODERN

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

## Legislative Tracking System

- Fitur
  - Pelacakan status RUU (dan perubahannya)
  - Monitoring Komisi
  - Rekaman pengambilan Keputusan (Voting,..)
  - Notification and Alerts
  - Search and Reporting Tools
  - Visualisasi keterkaitan antar produk perUUan
  - Peringkasan Dokumen
  - Analisis Sentimen dan Masukan Publik

- Ditujukan untuk mempromosikan transparansi dan partisipasi dalam demokrasi.

### NLP & Speech Technology



### Technology REGTECH



## Public Access Portals

- Fitur
  - Legislation Tracking
  - Sesi Parlemen (Live Sidang)
  - Alat Partisipasi Masyarakat
  - Akses terhadap Dokumen Legislatif
  - Profil Anggota dan Akses terhadap anggota
  - Kemampuan Search beragam
  - Sistem Rekomendasi

- Termasuk akses terhadap dokumen legislatif, siaran langsung (live streaming) sesi parlemen, fasilitas memasukkan aspirasi masyarakat.
- Ditujukan untuk mempromosikan transparansi dan partisipasi dalam demokrasi.

### • Teknologi

- Layanan streaming media
- Form, forum, CRM
- Document Management System
- Content Management System
- Analytics (Artificial Intelligence)

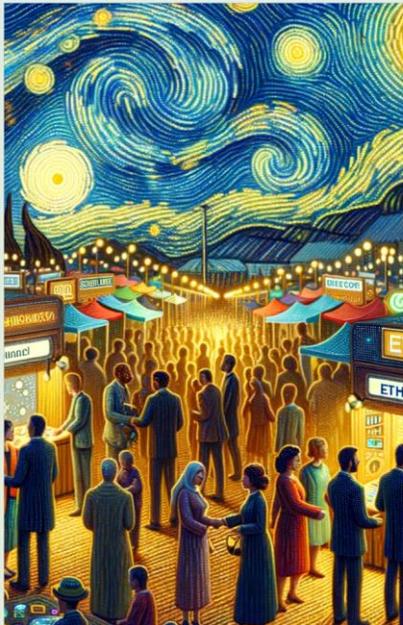


Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



## Penutup

DPR memerlukan data yang tepat untuk mendukung pembuatan kebijakan berdasar evidence/ data

**Perlu integrasi** dari data tersebut agar data bersifat konsisten, valid, efisien

**Pembangunan repositori data/ informasi** langkah awal menuju Evidence-based Policy Making

**Pemanfaatan** Teknologi AI akan meningkatkan kemampuan repositori

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Sesi Pertanyaan dan tanggapan dari peserta seminar *tentang evidence-based policy making*:

1. Peserta: Dr. Ayi Hidayat, Wakil Rektor 4 Universitas Lampung

Dalam kesempatannya, Dr. Ayi Hidayat menanggapi bahwa ketika ingin membangun intimasi antara perguruan tinggi dengan badan keahlian selaku *supporting system* dari Parlemen, sistemnya harus kokoh. Dengan berbicara tentang wacana-wacana yang bersifat kekinian, perlu adanya semacam hukum untuk menjustifikasi kolaborasi ini, sehingga kebersamaan dengan perguruan tinggi menjadi permanen. Sebagai *tool set*, kita perlu punya peningkatan *skill set* dan *mindset* yang sama untuk memberikan solusi terhadap ketertinggalan Indonesia di ranah SDGs dalam agenda PBB. Jika ini diregistrasikan dalam bentuk perundangan, maka bisa dilahirkan dari forum diskusi ini untuk didorong lebih.

2. Peserta: Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyetujui usul sebelumnya, beliau mengatakan bahwa perlu adanya pertemuan seperti ini dan ditindaklanjuti, sama halnya dengan permintaan mengenai pembuatan dasar hukum, sehingga seluruh kebijakan yang digotong DPR RI perlu berkolaborasi dan berdiskusi dengan para pakar di perguruan tinggi karena beberapa kebijakan yang sudah dibuat itu seringkali tidak diterima oleh masyarakat, bahkan menjadi kontroversi. Selain itu, beliau juga meminta agar hasil penelitian dari para peneliti bisa lebih diterima dan diakui oleh industri dalam memenuhi permintaan presiden mengenai perguruan tinggi yang kompatibel dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri).

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

---

# **SESI II**

# **SEMINAR NASIONAL**

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**KOLABORASI DALAM MEMPERKUAT EKOSISTEM DATA SEBAGAI WUJUD  
MEANINGFUL PARTICIPATION MENUJU PARLEMEN MODERN**

*Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.SE.*

**PLH. KEPALA PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN NEGARA**



Integrasi menjadi hal yang paling penting dalam memberikan *supporting* sistem bagi DPR RI kedepannya. Selama ini Badan Keahlian belum memiliki data yang bisa dipakai bersama secara terintegrasi. Data menjadi step awal

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

yang paling penting untuk kita bangun bersama dalam mendukung kinerja Anggota Dewan.

Data menjadi aspek yang sangat penting, karena sesuai dengan semangat Badan Keahlian yang mendorong perumusan kebijakan berdasarkan data (*evidence-based policy making*). Tanpa data, kualitas kebijakan yang akan dihasilkan akan menjadi buruk, karena perumusan kebijakan mungkin hanya berbasis kepada opini dan argumentasi semata. Kebijakan yang dihasilkan hanya *based on* opini, tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan publik yang terjadi. Oleh karena itu, data dan *evidence*, menjadi *tools* paling penting dalam merumuskan kebijakan yang baik. Bahkan kedepannya, bukan tidak mungkin jika seluruh data sudah diinventarisir dengan baik, perumusan kebijakan tidak hanya berbasis data/bukti, namun juga menggunakan *Artificial Intelligence (AI)*.

Perguruan tinggi maupun akademisi secara lebih luas memiliki peran penting dalam mendukung tujuan tersebut (perumusan kebijakan berbasis data). Perguruan tinggi merupakan wadah dimana riset-riset yang berkualitas dihasilkan. Mengenai penelitian, sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi sangat banyak, apabila dibandingkan dengan Badan Keahlian. Masih banyak sekali bidang-bidang keilmuan yang tidak dimiliki oleh Badan Keahlian. Dalam rangka mengisi keterbatasan tersebut, Badan Keahlian memerlukan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi.

Hasil riset yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, semestinya dapat dimanfaatkan secara implementatif dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan kedepannya. Selain hasil riset yang termanfaatkan,

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

peran penting perguruan tinggi juga menjadi penting dalam hal pengembangan kapasitas SDM di parlemen, baik bagi Anggota Dewan, maupun para staf di parlemen. Tujuan-tujuan tersebutlah yang kemudian menjadikan peranan perguruan tinggi menjadi sangat penting, serta integrasi data dan informasi antara perguruan tinggi dan parlemen menjadi hal yang *urgent* untuk dilakukan kedepannya, demi menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas kedepan.

Integrasi data dan informasi antara Badan Keahlian DPR RI dan perguruan tinggi tersebut dapat dimulai dengan mengoptimalkan *platform* yang saat ini tengah ada di DPR RI, yaitu Simfoni. Melalui *platform* simfoni tersebut, integrasi data antara Badan Keahlian DPR RI, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan Perguruan Tinggi dapat dilakukan. Badan Keahlian akan mengelola bahan-bahan yang diperoleh dari mitra kerja AKD, maupun produk-produk terkini yang ada di Badan Keahlian, yang dapat dibagikan kepada Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Perguruan Tinggi dapat mengakses bahan-bahan dan produk-produk Badan Keahlian tersebut, serta memberikan pandangan dan masukan secara langsung melalui menu yang ada di simfoni. Selain itu, Perguruan Tinggi juga dapat memberikan produk-produk dan kajiannya kedalam simfoni, yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh Badan Keahlian dan AKD di dalam pembahasan-pembahasan di DPR RI.

Melalui wadah simfoni ini, diharapkan kedepannya Badan Keahlian nantinya bisa secara langsung meminta masukan dari akademisi mengenai isu-isu tertentu yang sedang berkembang dan dibahas di DPR. Sehingga pandangan Bapak/Ibu akademisi dapat tersalurkan langsung dalam

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

pembahasan maupun perumusan kebijakan kedepannya. Sosialisasi dan panduan mengenai penggunaan simfoni tersebut, sudah disampaikan kepada staf dari Bapak/Ibu sekalian di perguruan tinggi, beserta pembagian akun kepada masing-masing Perguruan Tinggi.

Selain berbagi data, dalam rangka *rebranding* Badan Keahlian, kedepannya Badan Keahlian juga mendorong untuk memanfaatkan berbagai teknologi agar produk-produk Badan Keahlian dapat lebih mudah diakses dan dimanfaatkan. Awalnya Badan Keahlian menggunakan *whatsapp blast*, saat ini Badan Keahlian tengah mencoba menggunakan *QR Code* dalam membagikan produk-produk di Badan Keahlian. Sehingga, Bapak/Ibu Anggota Dewan nantinya hanya cukup melakukan scan *QR Code*, untuk mengakses bahan-bahan rapat, maupun kajian-kajian pendukung dari Badan Keahlian, sesuai dengan tema dan topik bahasan rapat. Harapannya, ini akan menjadi lebih praktis kedepannya, sehingga bermanfaat secara optimal bagi Bapak/Ibu Anggota Dewan.

Selain mengintegrasikan data, di internal Badan Keahlian saat ini juga tengah melakukan integrasi terhadap produk-produk di Badan Keahlian, serta mengembangkan sosial media di Badan Keahlian, termasuk *podcast*. Dalam hal pengembangan sosial media maupun *podcast*, dibutuhkan analisis-analisis secara khusus, baik *social media specialist*, maupun *data analyst* secara khusus yang akan menjalankan sosial media Badan Keahlian sehingga dapat lebih optimal dalam meningkatkan *engagement* di sosial media.

Terakhir, dilihat dari *milestone* dalam integrasi data dan *rebranding* Badan Keahlian, dapat terlihat bersama bahwa langkah dan jalan untuk

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

menuju parlemen *modern* masih cukup panjang. Hari ini Badan Keahlian masih berada dalam tahap integrasi data, *collecting* dan mengumpulkan data-data yang ada. Selanjutnya Badan Keahlian akan melakukan integrasi pada website Badan Keahlian, yang selama ini secara parsial dijalankan oleh masing-masing pusat, kedepannya akan kita satukan melalui website Badan Keahlian. Begitu pula dengan sosial media yang ada di Badan Keahlian, kedepannya Badan Keahlian akan menyatukan serta mengembangkan sosial media-sosial media dari Pusat-Pusat yang ada di Badan Keahlian menjadi satu.

### **Materi/Paparan**

**KOLABORASI DALAM  
MEMPERKUAT EKOSISTEM  
DATA SEBAGAI WUJUD  
MEANINGFUL PARTICIPATION  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

www.bk.dpr.go.id | bk.dprri

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jakarta  
29 Februari 2024

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

## Pendahuluan



Integrasi data dan informasi menjadi fondasi yang sangat penting untuk membantu Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Di sisi lain, integrasi data ini merupakan bentuk dari perwujudan akses teknologi informasi dalam menuju parlemen modern.



Badan Keahlian (BK) bekerjasama dengan unit-unit kerja terkait (AKD) untuk menyelenggarakan integrasi dan digitalisasi produk-produk BK yang dihasilkan oleh Pusat-Pusat di lingkungan BK.

Di sisi lain, mempermudah AKD dalam memberikan data dan informasi isu faktual yang terjadi di AKD.



BK berencana menyelenggarakan integrasi data dan informasi bersama Perguruan Tinggi sebagai tindak lanjut atas hasil kerjasama/MoU yang telah dilakukan. Integrasi ini bertujuan untuk memperkaya referensi guna memperkuat kualitas produk yang dihasilkan.



Hal ini dilakukan guna meningkatkan layanan dan mendekatkan produk layanan BK kepada pemanfaatnya yaitu Anggota DPR RI, maupun unsur masyarakat dalam rangka mewujudkan meaningful participation sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id)  [bk\\_dpri](https://www.instagram.com/bk_dpri)

## Pengambilan Keputusan Publik yang Ideal dalam Parlemen

*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*

**01** Legislasi

**02** Anggaran

**03** Pengawasan

Kualitas Teknik dan Tingkat Kepercayaan



Waktu dan Usaha yang dibutuhkan

- Kualitas teknik dan reliabilitas data yang diperoleh memengaruhi keputusan yang diambil.
- Makin berkualitas data, waktu pengumpulannya pun makin lama, namun kebijakan yang diambil makin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jakarta  
29 Februari 2024

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id) [bk\\_dpri](https://www.instagram.com/bk_dpri)



Alur Integrasi Data antara AKD - BK - PT

[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id) [bk\\_dpri](https://www.instagram.com/bk_dpri)

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

Jakarta  
29 Februari 2024

**Before**

**After**

Anggota DPR RI dapat mengakses produk BK melalui QR Code\* tanpa harus login ke Aplikasi Simfoni DPR RI.  
\*) QR Code dapat ditemukan di komisi

Kemudahan dalam Mengakses Produk BK

[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id) [bk\\_dpri](https://www.instagram.com/bk_dpri)

**INTEGRASI DATA**

**PRODUK**  
(Jurnal, Policy Brief, etc)

**SOSIAL MEDIA**  
termasuk pengembangan PODCAST

**PROSES**

**PENGANTARAN**

**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
Badan Keahlian DPR RI  
Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Rencana Integrasi Badan Keahlian

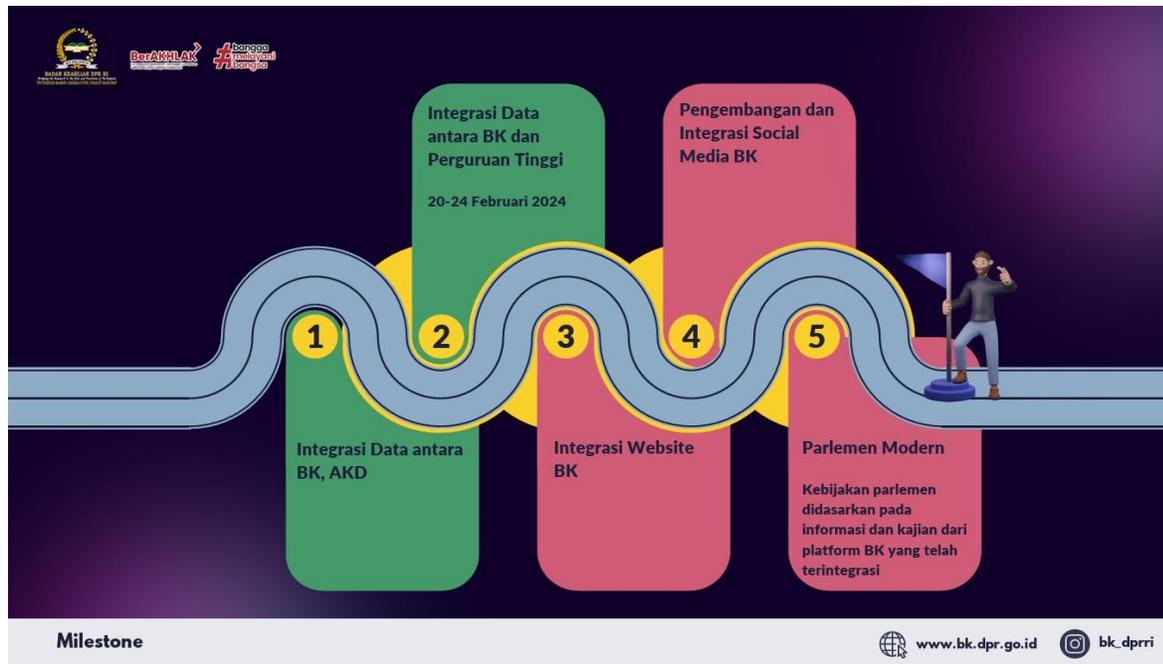
[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id) [bk\\_dpri](https://www.instagram.com/bk_dpri)

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

## **SIMFONI**

**(SISTEM INFORMASI FORUM ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
DAN MITRA KERJA DPR RI)**

*Yan Setyawan, S.Kom*

**PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA – SETJEN DPR RI**



Masuk ke bagian implementasi simfoni, dimana aplikasi simfoni telah digunakan sejak tahun 2019 lalu, dengan tujuan untuk memudahkan sharing data dan bahan rapat antara AKD dengan mitra kerjanya. Saat ini, mitra yang sudah mengaktifkan dan menggunakan simfoni mencapai 300 mitra (diluar

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

internal DPR RI), dengan data yang sudah dipergunakan mencapai 4 *terabyte*. Untuk dapat mengakses simfoni, bapak/ibu sekalian dapat masuk ke laman <https://simfoni.dpr.go.id/>.

Simfoni menjadi salah satu *platform* yang memiliki tingkat keamanan cukup baik. Simfoni dikelola pada *on premise server*, artinya DPR RI memiliki data server milik sendiri di Senayan, dan sistem yang semuanya terpusat di senayan, sehingga dapat terjamin untuk masalah keamanannya. Simfoni juga menggunakan *user access management*. Artinya, setiap user memiliki sekat-sekatnya sendiri. Sehingga data yang dimiliki tidak mungkin bisa diakses oleh pihak lainnya, tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik datanya. Dengan demikian data-data yang ada di simfoni dapat dijamin keamanannya.

Beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pihak Perguruan Tinggi dalam aplikasi simfoni ini, diantaranya Bapak/Ibu dari Perguruan Tinggi dapat menerima bahan dan produk-produk dari Badan Keahlian DPR RI, maupun bahan-bahan dari mitra kerja DPR. Di sisi lain, perguruan tinggi juga dapat memberikan masukan untuk DPR, dengan mengupload bahan-bahan dukungan untuk DPR RI.

Pada 12 Februari 2024 lalu, Badan Keahlian telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) bagi para admin user di Perguruan Tinggi, serta diikuti oleh lebih dari 60 Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Badan Keahlian. Setiap Perguruan Tinggi telah diberikan username beserta password, sehingga dapat langsung mengakses maupun memberikan data-data didalam simfoni tersebut.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Kedepannya, beberapa pengembangan di bidang IT akan coba dilakukan secara *massive*, untuk mendukung kerja-kerja Anggota Dewan. Jika saat ini simfoni masih bersifat *cloud based*, kedepannya simfoni akan menggunakan aplikasi “Langit”, dimana aplikasi Langit tersebut juga digunakan untuk komunikasi data secara eksternal, dengan mitra-mitra kerja DPR juga dengan K/L lainnya, dengan menggunakan sistem *web based*, yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Sehingga kedepannya akan menggunakan Satu Data Indonesia untuk data-data, misalnya data statistik yang merujuk ke datanya BPS, pertanahan yang merujuk ke ATR/BPN, dan sebagainya.

Pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan tersebut nantinya akan dipadukan menjadi suatu *Super Apps* berbasis *mobile*, yang akan menghimpun bahan-bahan dari Badan Keahlian, Perguruan Tinggi, Mitra Kerja DPR, aspirasi dari masyarakat akan dikelola didalam *Super Apps* yang akan berbasis *Artificial Intelligence (AI)*. Saat ini, DPR RI tengah mempelajari dan mengembangkan bagaimana memadukan AI dan *machine learning*, dengan hasil-hasil pembahasan di DPR, baik pada risalah rapat, laporan hasil rapat, dan sebagainya. Penggunaan *Super Apps* berbasis *mobile* ini dipilih karena dari segi kemudahan akses dan keamanannya dapat lebih terjamin, dibandingkan apabila berbasis *web*. Melalui pengembangan *Super Apps* ini harapannya dapat membantu Bapak/Ibu Anggota Dewan dalam bentuk supply data dan analisis, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada data.

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jakarta  
29 Februari 2024

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**Materi/Paparan**

**Tentang SIMFONI**

*“Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI”*

SEJAK 2019

User Mitra **+300**

Storage Usage **+4TB**

**Platform Terpercaya**

- on premise server
- user access management

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

## Apa yang dapat dilakukan?

BerAKHLAK  
BerAKHLAK  
BerAKHLAK



Menerima **Bahan dari**  
**Mitra Kerja DPR**



Menerima **Produk dari**  
**Badan Keahlian DPR**



Memberikan  
**Masukan untuk DPR**

## Sosialisasi dan Bimtek Kampus



**KAMPUS  
+60**

BerAKHLAK  
BerAKHLAK  
BerAKHLAK

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

Jakarta  
29 Februari 2024

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

***“Data yang terpisah memiliki  
potensi besar, namun integrasi  
adalah kunci untuk mengaktifkan  
nilainya”***



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**TRANSFORMASI BADAN KEAHLIAN DPR RI**

***Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.***

**ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA – BADAN KEAHLIAN DPR RI**



Setelah pembahasan mengenai integrasi data dan peranan pentingnya, serta penggunaan aplikasi simfoni sebagai *tools* bagi pakai data yang akan kita lakukan, pembahasan mengenai transformasi apa lagi yang perlu dilakukan oleh Badan Keahlian saat ini dalam menunjang kebutuhan-kebutuhan Bapak/Ibu Anggota Dewan. Atas izin Bapak Kepala Badan Keahlian, telah

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN  
“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

terbentuk tim yang beranggotakan anak-anak muda, yang memiliki berbagai minat. Berbagai minat tersebut saat ini tengah coba diformulasikan bersama menjadi berbagai *supporting*, yang nantinya dapat mendorong pengembangan dukungan-dukungan dan layanan yang akan diberikan Badan Keahlian kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan. Kunci dari semua hal tersebut adalah inovasi.

Terdapat 3 hal yang akan coba dilakukan oleh Badan Keahlian dalam waktu dekat kedepannya, yang pertama yaitu melakukan *rebranding* Badan Keahlian. *Rebranding* yang akan coba dilakukan oleh Badan Keahlian bukan dalam hal *promote*, melainkan *rebranding* dari segi peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Badan Keahlian, agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi Bapak/Ibu Anggota Dewan. Kedua, Badan Keahlian akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan dukungan kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan. Ketiga, Badan Keahlian ingin lebih meningkatkan kolaborasi dengan berbagai civitas academica dalam pemberian layanan kepada DPR RI.

*Rebranding* yang akan dilakukan oleh Badan Keahlian pada intinya berupaya untuk bertransformasi agar produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Keahlian dapat lebih termanfaatkan oleh para penggunanya. Kajian-kajian, analisis, jurnal, buku dan sebagainya yang dihasilkan oleh Badan Keahlian, akan ditransformasi menjadi bentuk-bentuk yang lebih menarik sehingga meningkatkan minat pengguna dalam membaca data dan informasi yang disampaikan. Selain itu, diseminasi melalui media sosial, youtube, maupun *podcast* juga penting dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

dari user dalam mengakses informasi yang disampaikan oleh Badan Keahlian. Kedepannya, Badan Keahlian juga akan menjadi satu-satunya portal untuk mendiseminasi produk-produk yang dihasilkan, sehingga tidak terfragmentasi di masing-masing pusat atau unit kerja.

Pemanfaatan teknologi dan informasi yang akan dioptimalkan oleh Badan Keahlian diantaranya yaitu penggunaan *platform* digital yang memungkinkan bagi pakai data antara Badan Keahlian, AKD, maupun perguruan tinggi (dalam hal ini simfoni), serta kemungkinan-kemungkinan pengembangan simfoni kedepannya. Inovasi lainnya yang ingin Badan Keahlian lakukan yakni mengembangkan teknik pengumpulan data secara digital dan inovatif melalui digital survei/telesurvei. Selanjutnya Badan Keahlian juga akan mengembangkan inovasi melalui pengembangan AI dalam mendukung kinerja DPR RI.

Kolaborasi yang intensif dengan perguruan tinggi dalam menghasilkan data dan informasi yang komprehensif bagi DPR RI juga menjadi hal penting yang perlu terus dilakukan. Selain kolaborasi melalui bagi pakai data yang dikembangkan melalui aplikasi simfoni, Badan Keahlian juga akan mengembangkan pengumpulan data dan diskusi jarak jauh dengan melibatkan pakar-pakar yang ada di perguruan tinggi terkait isu-isu yang menjadi perhatian DPR RI. Melalui kolaborasi yang intensif tersebut, harapannya sewaktu-waktu ketika terdapat pembahasan mengenai suatu isu tertentu di DPR RI, masukan-masukan dari berbagai perguruan tinggi dapat terhimpun secara cepat, melalui aplikasi yang kita kembangkan tersebut.

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

Demikian pemantik yang dapat kami bertiga sampaikan, mudah-mudahan Bapak/Ibu Rektor/Wakil Rektor, Dekan/Wakil Dekan/Direktur dapat memberikan masukan-masukan yang dapat membantu kami dalam membangun dan mengembangkan sistem kolaborasi yang lebih baik kedepannya bagi kita semua.

**Materi/Paparan**

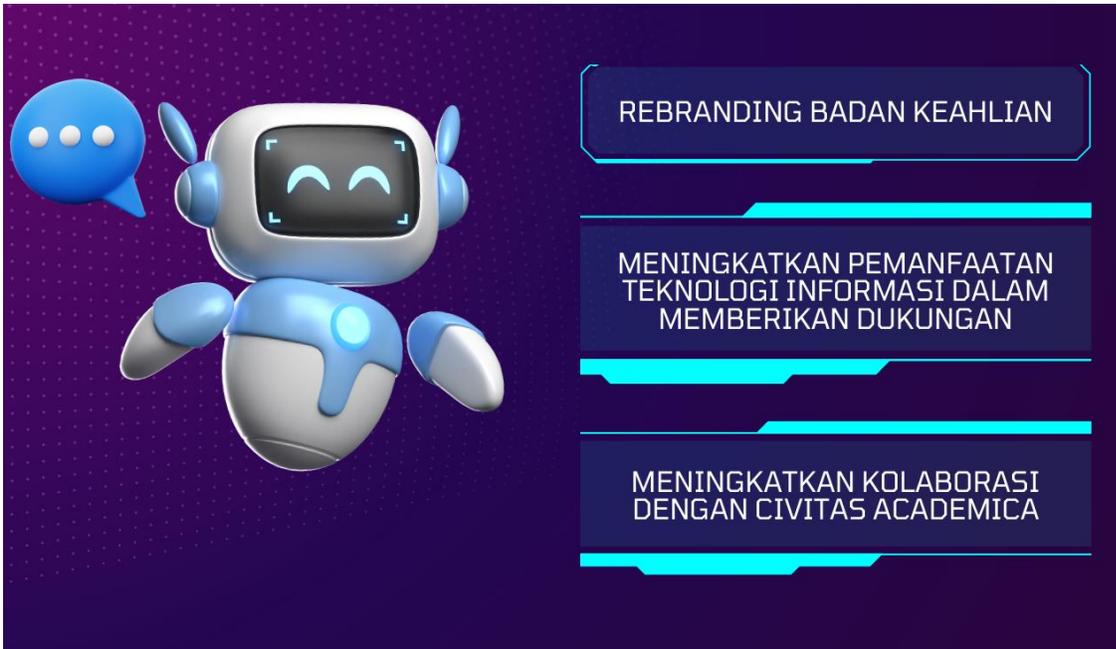


Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



**1 REBRANDING  
BADAN KEAHLIAN**

Bertransformasi menjadi organisasi yang mendukung Parlemen Modern melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan dukungan substansi kepada DPR RI.

Menjadi portal utama dalam mendiseminasi setiap produk pusat-pusat yang ada dengan variasi penyampaian yang inovatif dan didukung dengan tenaga pendukung yang profesional di bidangnya.



Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

**③ KOLABORASI YANG INTENSIF  
DENGAN PERGURUAN TINGGI**

Selain bagi pakai data yang dikembangkan menggunakan platform SIMFONI, Badan Keahlian juga akan mengembangkan pengumpulan data dan diskusi jarak jauh dengan melibatkan pakar-pakar yang ada di perguruan tinggi terkait isu-isu yang menjadi perhatian DPR RI.



**TERIMA KASIH**



[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id)



[bk\\_dpri](https://www.instagram.com/bk_dpri)

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

**Respon dan Masukan Perguruan Tinggi  
Terhadap Integrasi Data dan *Rebranding* Badan Keahlian  
Setjen DPR RI**

**1. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.**

Pendapat dan Masukan:

Implementasi Simfoni memiliki tantangan bagi Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pimpinan PT perlu menyampaikan kepada para dosen. Artinya, masih perlu koordinasi lebih lanjut dari pihak PT untuk *updating* mengenai tukar informasi sehingga dosen terdorong untuk memberikan masukan juga. Maka dari itu, Perlu dihubungkan antara PIC pada setiap PT dengan Dosen agar pertukaran informasi pada Simfoni terus tersambung dan berkesinambungan.

**2. Prof. Dr. Frans Salesman, S.E., M.Kes.**

Pendapat dan Masukan:

**a. Integrasi data**

Badan Keahlian harus berasosiasi dengan data yang ada di eksekutif. Perlu menjadi catatan bahwa data di eksekutif bukan merupakan data yang ideal. Catatan berikutnya adalah data baik dari eksekutif maupun Badan Keahlian harus terhindar dari data yang tidak sesuai dengan fakta dan data yang *under accounting*.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

**b. Rebranding**

*Rebranding* yang akan dilakukan Badan Keahlian kedepannya harus mengubah layanan menjadi digital dan juga memerhatikan apakah pengguna data sudah memiliki literasi digital yang baik.

**c. Kolaborasi**

Pelibatan PT di daerah diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dosen maupun perguruan tinggi di daerah

**d. Kondisi Empiris**

72 Perguruan Tinggi dengan beragam rumpun keilmuan yang telah bekerjasama dengan Badan Keahlian tahu persis kondisi di lapangan.

**3. Prof. Retno Mawarini Sukmariningsih, S. H., M.Hum**

Pendapat dan Masukan:

Apresiasi untuk Badan Keahlian untuk Integrasi data dan *Rebranding*. Namun yang menjadi catatan ketika data sudah tertata dengan baik adalah kurang maksimalnya sinergitas antara Badan Keahlian dengan Perguruan Tinggi. Maka dari itu haruslah ada PIC untuk menjaga sinergitas, *entry point* dari data supaya dapat dikelola dengan baik adalah pada level Perguruan Tinggi sendiri yakni pada Perpustakaan. Pada Perguruan Tinggi juga dapat dibentuk tim kecil agar bisa *delivery* ke *decision maker*.

Pertanyaan:

Apakah dimungkinkan adanya komunikasi dua arah antara Perguruan Tinggi dengan DPR RI?

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Jawaban:

Simfoni bersifat 2 (dua) arah. Dari Badan Keahlian ke Perguruan Tinggi, dan dari Perguruan Tinggi ke Badan Keahlian.

**4. Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.**

Masukan:

Apabila Perguruan Tinggi hanya sekedar menyampaikan data dan kritik saja akan dirasa sangat kurang efektif dan kurang respon. Maka dari itu Badan Keahlian harus membuat identifikasi isu penting yang berkaitan. Langkah selanjutnya mengundang Perguruan Tinggi untuk melakukan FGD terbatas dengan kelompok kecil yang terdiri dari 10-15 orang secara virtual untuk memperdalam. Karena jika tidak ada lanjutan setelah *feeding* via Simfoni, akan berhenti pada tahap tersebut. Melalui diskusi tersebut, DPR juga dapat memberikan klarifikasi dengan Perguruan Tinggi.

**5. Leo Agustino, Ph.D.**

Masukan:

Apresiasi terhadap kerja keras Badan Keahlian dalam rangka supporting Parlemen. Namun yang menjadi perhatian adalah *rebranding* yang dilakukan Badan Keahlian masih menimbulkan keraguan. Simfoni ini merupakan wujud nyata Badan Keahlian dalam membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang nantinya berguna sebagai basis ilmiah dalam menentukan kebijakan akan masih lebih kuat *political interest-*

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

nya dikarenakan DPR RI merupakan Lembaga politis. Namun yang menjadi catatan berikutnya adalah ketika sudah ada data yang di *supply* terkait data dari daerah yang bersifat *bottom-up* yang terus *update*, bagaimana langkah selanjutnya untuk dilakukan analisis, harus ada forum secara periodik dengan *scholar* untuk nantinya dapat memberikan masukan dan analisis.

**6. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.**

Pertanyaan:

UNPAR belum mendapatkan akses sebagai admin/PIC di dalam SIMFONI. Apakah dimungkinkan untuk diadakan bimtek susulan?

Jawaban:

Badan Keahlian akan melakukan bimtek lagi mengenai penggunaan SIMFONI dengan mengundang Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Badan Keahlian. Bimtek tersebut akan dilakukan secara virtual dan akan direkam sehingga dapat diputar kembali. Badan Keahlian juga akan membuat grup khusus untuk memperlancar komunikasi mengenai *updating* di SIMFONI.

**7. Din Wahid, MA., Ph.D.**

Masukan:

Perguruan Tinggi banyak melakukan penelitian tapi hanya selesai dan tidak *targeted*. Inovasi yang dilakukan Perguruan Tinggi adalah dengan

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

*summarize* penelitian dalam bentuk *policy brief*. Apakah dimungkinkan dari Perguruan Tinggi untuk memberikan *policy brief* berdasarkan riset yang telah dilakukan dapat disampaikan kepada DPR RI walaupun tidak ada permintaan dari DPR RI?

Selain penelitian, data-data terkait para ahli beserta keahliannya dari seluruh kampus yang bekerjasama sebaiknya dapat diberikan kepada Badan Keahlian sehingga semakin banyak pakar yang terlibat dalam pengambilan keputusan di DPR.

**8. Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, S.H.,MM.**

Masukan:

Apa yang dilakukan Badan Keahlian tidak sekedar Integrasi data dan *rebranding* namun ini merupakan upaya penyelamatan bangsa. Di era *post trust* saat ini, kebenaran tidak hanya berdasarkan data dan fakta tapi *based on perception*. Maka dari itu, kesalahan dan kebenaran akan menjadi bias tergantung pada persepsi dikarenakan adanya *invisible hand* yang mengintervensi setiap keputusan dan kebijakan yang akan ditetapkan oleh legislatif. Semakin banyak data dan fakta yang di sediakan maka terdesak kebenaran yang berdasarkan persepsi. Karena itu upaya dari Badan Keahlian ini merupakan langkah awal dalam menyelamatkan bangsa karena episentrumnya ada di Badan Keahlian.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

**“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”**

**9. Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M**

Masukan:

Berbicara bagaimana perguruan tinggi dapat membantu Badan Keahlian dalam mendukung para anggota DPR sebenarnya terdapat beban moral yang berat. Barangkali ini terkait masalah terminologi. Dalam *database* yang paling utama adalah *data integrity*. Komponennya adalah *data integration, data quality, data enrichment, dan location intelligence*. Yang disampaikan dari Badan Keahlian baru satu komponen, yaitu integrasi data dimana adanya keterhubungan data. Sehingga ke depannya hal ini perlu dinaikkan levelnya menjadi *data integrity*. Dengan demikian maka tidak perlu khawatir lagi dengan *data quality* karena semuanya telah tercakup. *Database* yang demikian diharapkan mampu membantu DPR dalam menyusun kebijakan yang baik bagi Indonesia.

**10. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A**

Masukan:

Saat ini adalah era 4.0 yang ciri-cirinya adalah *big data, coding, dan artificial intelligence (AI)*. AI harus dapat diantisipasi karena ini menjadi potensi problematika di masa mendatang yang juga harus dihadapi. Pada dasarnya masing-masing perguruan tinggi di Indonesia telah memiliki *one gate system* dimana seluruh data berada dalam satu sistem *big data* karena itu merupakan salah satu penilaian untuk menaikkan *grade* perguruan tinggi. Beberapa Kementerian lain juga telah memiliki super app seperti PUSAKA di Kementerian Agama. Adapun yang hendak

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

dibangun oleh Badan Keahlian adalah sistem yang menghubungkan data di DPR dengan data yang dimiliki perguruan tinggi dalam level dan isu tertentu.

Selain itu ide mengenai podcast adalah ide yang sangat baik bahkan jika mungkin dibuat IIC, yaitu *Indonesia Interdisciplinary Club* dimana forum tersebut dapat menjadi tempat berkumpulnya pakar dari seluruh Indonesia yang diharapkan mampu mewarnai pengambilan kebijakan di DPR RI. Kondisi saat ini, banyak pakar-pakar di daerah yang kurang dikenal karena pakar yang seringkali muncul adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan atau di Jakarta.

**11. Prof. Ganefri, Ph.D**

Masukan:

Untuk memperkuat keberadaan forum pada hari ini dan kegiatan kita ke depannya maka perlu diberikan nama untuk forum ini misalnya diberi nama Forum Komunikasi Mitra Badan Keahlian DPR RI atau semacamnya. Dengan adanya nama maka akan muncul ikatan. Hal ini menjadi penting karena sepertinya ke depan akan ada kegiatan lain sebagai kelanjutan dari forum ini. Badan Keahlian juga perlu datang Kembali ke perguruan tinggi sehingga nuansa *rebranding* dapat dirasakan oleh perguruan tinggi mitra.

Adapun terkait kerja sama, pertama, dapat dilakukan *video conference* yang menjadikan mahasiswa dapat mengikuti sidang di DPR. Hal serupa telah dilakukan Bersama Mahkamah Konstitusi dan menjadi salah satu

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

program yang sangat menarik. Kedua, produk yang dibagikan dalam integrasi data perlu dikemas dengan lebih menarik misalnya dengan menggunakan infografis karena saat ini masyarakat cenderung lebih menyukai dan juga mudah memahami informasi dalam bentuk infografis.

Dengan demikian, dalam mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada bagi-pakai data namun juga hal lain yang sekiranya dapat dikerjasamakan berkaitan dengan tri dharma perguruan tinggi. Jangan sampai kehadiran perguruan tinggi di DPR menimbulkan pertanyaan, sehingga kerja sama ini tidak boleh keluar dari koridor tri dharma perguruan tinggi.

**12. Prof. Dr. Ir. Marwan Dr Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A**

Masukan:

Pada dasarnya kerja sama ini merupakan upaya memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dengan tridharmanya. Oleh karena itu perlu dibangun ekosistem kerjamasa dalam wadah tertentu sehingga jelas hak dan kewajiban, pola partisipasi, fasilitasi, dan lain sebagainya yang juga dilandaskan pada regulasi dan desain yang jelas.

Kemudian untuk menjaga keberlanjutannya, dapat juga dicontoh yang telah berlaku di Inggris dimana beberapa perguruan tinggi diberi mandat khusus untuk memberikan pendidikan akademik yang memadai bagi calon anggota parlemen.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

**13. Prof. Irwan Trinugroho, M.Sc., Ph.D**

Masukan:

Perguruan tinggi secara mandiri sering kali mengadakan diskusi publik terkait kebijakan publik, misalnya RUU. Selain itu, *policy brief* telah menjadi luaran wajib bagi perguruan tinggi namun saat ini dari UNS sendiri lebih banyak mengirimkan *policy brief*-nya kepada eksekutif. Dengan adanya kerja sama ini hasil dari diskusi publik maupun *policy brief* dapat disalurkan melalui sistem integrasi data kepada DPR RI melalui Badan Keahlian. Untuk SIMFONI sendiri, sub-menu di dalamnya daripada diklasifikasikan berdasarkan komisi, lebih baik diklasifikasikan berdasarkan substansi/tema.

Selanjutnya adalah terkait dengan insentif yang akan didapatkan oleh akademisi yang secara aktif memberikan sumbangsih pemikirannya dalam integrasi data ini. Dari pihak perguruan tinggi bisa saja memberikan insentif tambahan namun akan menjadi lebih baik apabila dari Badan Keahlian dapat memberikan rekognisi misalnya dalam bentuk sertifikat atau semacamnya. Sertifikat ini juga diperlukan akademisi sebagai bentuk legitimasi atas apa yang sudah dilakukannya.

**14. Dr. Andreas Budi Widyanta, M.A.**

Masukan dan Pertanyaan:

Pertama, bagaimana data di perguruan tinggi akan dihimpun? Apakah konsetris atau konvergen? Hal ini perlu dipikirkan karena masing-masing perguruan tinggi memiliki mekanisme yang berbeda dalam

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

pengelolaan data. Selain itu, Badan Keahlian juga perlu memiliki daftar pakar yang memang dianggap kredibel untuk menjadi pakar di bidangnya masing-masing.

Kedua berkaitan dengan data, data seperti apa yang akan dihimpun dalam sistem integrasi data ini? Apakah data mentah atau data yang sudah dianalisis? Jika sudah dianalisis maka data tersebut sudah mengandung paradigma, dimensi teknokratis, dan dimensi praktis. Apabila berbagai jenis data dimasukkan dalam sistem integrasi data ini tanpa dipilah terlebih dulu maka dikhawatirkan sistem ini menjadi tidak efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian maka salah satu data yang dapat dipilih dan cukup ideal untuk dimasukkan dalam sistem tersebut adalah *policy brief*. *Policy brief* telah memiliki kerangka analisis yang dapat hasilnya dapat diimplementasikan menjadi suatu kebijakan yang Amanah.

Ketiga, Badan Keahlian perlu melakukan beberapa hal:

- a. perlu mendiseminasikan SIMFONI dan subjeknya perlu diperluas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. membuat klasifikasi kepakaran dari tiap perguruan tinggi karena baik kepakaran maupun kearifan lokal masing-masing daerah dan perguruan tinggi berbeda.
- c. secara aktif mengadakan forum *online* ataupun *offline* antara Badan Keahlian dengan Perguruan Tinggi yang dilakukan secara berkala dengan mendiskusikan isu-isu strategis dan juga solusinya.

Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

Jawaban:

Untuk data yang dimasukkan ke SIMFONI lebih baik bukan *raw material*. Selain agar data yang disimpan tidak terlalu besar, pada dasarnya yang diperlukan dari akademisi adalah pemikirannya yang terdapat dalam hasil analisis data.

**15. Mahendra Data, S.Kom., M.Kom., Ph.D.**

Pertanyaan:

Bagaimana *business process* dari sistem ini? Ketika ada isu, bagaimana Badan Keahlian menyampaikan permohonan data ke Perguruan Tinggi? Melalui surat resmi atau hanya notifikasi Simfoni? Kendalanya, jika permohonan data hanya berhenti di Admin/PIC Perguruan Tinggi, ia tak memiliki kendali untuk menanggapi maupun mendisposisi kepada yang memiliki kemampuan untuk menjawab.

Jawaban:

Akan dilakukan bimtek kembali untuk menjelaskan mengenai *business process*-nya. Diharapkan PIC perguruan akan hadir dalam acara ini. Adapun terkait PIC yang ditunjuk sebaiknya adalah sekretaris sehingga memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dan bukan sekedar operator.

Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*

**DOKUMENTASI KEGIATAN**



Jakarta  
29 Februari 2024

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN**

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***



Jakarta  
29 Februari 2024

***PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI***

***INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN***

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Jakarta  
29 Februari 2024

***PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI***

***INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN***

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Jakarta  
29 Februari 2024

***PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI***

***INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN***

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Jakarta  
29 Februari 2024

*PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI*

*INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN*

*“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”*



Jakarta  
29 Februari 2024

***PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT KOORDINASI  
DENGAN MITRA MOU BADAN KEAHLIAN DPR RI***

***INTEGRASI DATA DAN REBRANDING BADAN KEAHLIAN DPR RI  
MENUJU PARLEMEN MODERN***

***“Sinergitas Antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam  
menunjang Evidence Based Policy Making”***

